MANAJEMEN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN

Edisi Revisi

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
جامعة إيندراكيري الإسلامية
UNISI
ILMU KARYA ABDI

MANAJEMEN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN

EDISI REVISI

MANAJEMEN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.

Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

EDISI REVISI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN

I. Manajemen II. Pembangunan III. Teks

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN

EDISI REVISI

Penulis:

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

Editor/ Penyunting:

Ridhoul Wahidi

Penyelaras Akhir:

Minan Nuri Rohman

Cover & Layout:

st. Navisah

Penerbit:

Trussmedia Grafika
Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com

Cetakan Edisi Revisi, April 2013

viii + 120 ; 14 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-0992-26-6

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur keharibaan *Illahi Robbi Azza Wajalla,* atas limpahan taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul ***" MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN"***.

Buku ini menguraikan pentingnya konsep manajemen strategis untuk pembangunan daerah dan pedesaan. Kemudian menguraikan pula tentang sistem terbuka perencanaan strategis dalam rangka keberhasilan pembangunan daerah dan pedesaan yang didasarkan pada situasi dan kondisi internal dan eksternal atau kontekstual dimana program pembangunan dilaksanakan. Fokus sentral pembangunan yang dikemukakan terutama ditujukan kepada bagaimana suatu manajemen pembangunan daerah dan pedesaan yang dapat memberdayakan masyarakat di pedesaan melalui proses pembelajaran.

Penulis sebagai manusia biasa yang sarat *khilaf* menyadari adanya kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap masukan dan kritik membangun dari para pembaca demi kesempurnaan buku ini kemudian hari.

Kepada Allah SWT secara khusus penulis mengharapkan rahmat dan ridho-Nya semoga penulis senantiasa diberi jalan kemudahan dalam berkarya dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, Amin.

Pekanbaru, April 2013

PENULIS

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii

BAB I
PEMBANGUNAN DAERAH 1

1. Pendekatan Manajemen Strategis Dalam Pembangunan Daerah 1
2. Beberapa Issue Penting Pembangunan Daerah di Riau 5
3. Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Daerah yang Kontekstual 9
4. Beberapa Bidang Pembangunan yang Perlu Mendapat Perhatian 23
5. Arti Penting Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan Daerah yang Kontekstual 26

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DI ASIA TENGGARA 31

1. Pembangunan Demokrasi Ekonomi Bergandengan Dengan Demokrasi Politik 34
2. Pembangunan Ekonomi Berakar Pada Kerakyatan ... 37

BAB III
ADAPTASI SOSIAL PEMBANGUNAN PEDESAAN 51

1. Pendekatan Teori Struktural Fungsional 52
2. Pendekatan Teori Konflik 56
3. Pendekatan Teori Modernisasi 59

BAB IV
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEDESAAN 69

BAB V
PEMBANGUNAN EKONOMI DI PEDESAAN... 83

Daftar Pustaka 99

BAB I

PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pendekatan Manajemen Strategis Dalam Pembangunan Daerah

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik dan material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya dan ketahanan masyarakat.

Untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka, misalnya menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian di Asia Tenggara 2020, sosok kepemimpinan daerah otonom di Riau sebaiknya melaksanakan pembangunan dengan pendekatan manajemen strategis.

Pendekatan manajemen strategis dalam pembangunan sebagai salahsatu cara melihat (*paradigma*) proses pembangunan sebagai suatu sistem yang terbuka, terencana dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, variabel-variabel situasi dan kondisi internal dan eksternal di daerah adalah sangat penting, karena dapat menentukan efektivitas manajemen pembangunan. Sedangkan manajemen pembangunan yang efektif sebagai sistem terbuka, adalah manajemen pembangunan yang memperhitungkan dan mengakomudasi variabel-variabel situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal di daerah. Dengan demikian manajemen pembangunan daerah yang dianggap efektif adalah dengan pendekatan manajemen strategis.

Proses manajemen strategis dalam pembangunan meliputi enam elemen dasar : (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) strategi yang muncul kemudian, (4) implementasi strategi, (5) Keluaran atau hasil, dan (6) umpan balik.

Proses manajemen strategis dalam pembangunan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1. Proses Manajemen Strategi Sufian

Environmental Scanning
Strategy Formulation
Strategy Implementation
Output dan Outcomes
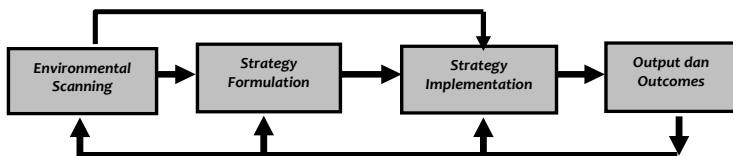
Sumber: Disertasi (2002)

Proses manajemen strategis dalam pembangunan tersebut, meliputi aktivitas-aktivitas yang terdiri dari :

a. Pra kondisi strategi (*Policy Analysis*) yaitu analisis lingkungan internal daerah (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal daerah (peluang dan tantangan) yang terdiri dari : analisis potensi alam, analisis potensi masyarakat, analisis keadaan pemerintahan daerah, analisis sumber pendapatan daerah, analisis kebutuhan masyarakat daerah, analisis kebijakan Pemerintah Pusat, analisis kebutuhan pasar dari sumber-sumber daerah, analisis perkembangan teknologi, dan analisis investasi Pemerintah dan swasta nasional.
b. Perumusan strategi (*Policy Formulation*) yaitu membangun visi, misi, strategi dan kebijakan dalam rangka merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan rencana jangka pendek untuk efektivitas manajemen pembangunan dari peluang dan tantangan lingkungan daerah dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan daerah, yang terdiri dari : organisasi perencana, proses pengambilan keputusan, merumuskan tujuan, merumuskan sasaran, merumuskan program, organisasi atau tim pelaksana program, sumber-sumber yang diperlukan, dan prosedur.

c. Menentukan efektivitas implementasi program pembangunan (*Policy Implementation*) yang terdiri dari: pengorganisasian sumber-sumber daya pembangunan, penggerakan sumber-sumber daya pembangunan, evaluasi dan pengawasan program pembangunan daerah dalam rangka menemukan dan mengantisipasi strategi yang muncul kemudian *(emergent strategy).*
d. Menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah *(Policy Out Put/Out Come)* yang terdiri dari : bidang pembangunan kualitas sumber daya manusia, perekonomian, fasilitas umum, keadaan lingkungan hidup, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pendapatan daerah.
e. Menentukan umpan balik (*Policy Feedback*) dalam rangka perbaikan perencanaan strategis selanjutnya.

Dengan demikian apabila pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan manajemen strategis yang merupakan sistem terbuka berarti bahwa selain sistem tersebut bersifat akomodatif, cepat tanggap, dan proaktif terhadap lingkungan, ia juga dapat mempertahankan dirinya dalam pertukaran esensi dan energi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Dengan demikian sistem terbuka selalu berusaha menjaga keberadaan dan keberlanjutan melalui kestabilan situasi dan kondisi internal dan eksternal secara

proporsional (komparatif), holistik, intrasektoral, dan fungsional, sehingga hasil pembangunan lebih optimal.

2. Beberapa Issue Penting Pembangunan Daerah di Riau

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Era Reformasi, berdasarkan kondisi, potensi dan kemampuan riil daerah. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Riau sekarang dapat dikatakan sedang giatnya melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saleh Djasit, ketika akan dipilih menjadi Gubernur Riau, dalam bukunya (1998:1-2) menyatakan ada beberapa kelemahan mendasar yang sangat mempengaruhi keterbelakangan daerah Riau dibandingkan dengan daerah lainnya, antara lain: struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada pengusaha besar, sehingga kurang merata dan mengakar ke bawah (*trickle-down-effect*); kualitas sumber daya manusia (SDM) Riau yang masih lemah dan kurang mendapat sentuhan yang berarti; dan Pengelolaan sumber daya alam yang keuntungannya belum dibagi secara proporsional bagi daerah Riau. Selanjutnya beliau menyatakan untuk mengatasinya maka diperlukan strategi dasar yaitu : mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada penguatan usaha kecil, menengah dan koperasi; meningkatkan SDM untuk mampu bersaing dalam

merebut setiap peluang di berbagai sektor kehidupan; dan diupayakan otonomi daerah yang lebih luas dan terus memperjuangkan pembagian keuntungan yang proporsional dalam pengelolaan setiap sumber daya alam yang dieksploitir di daerah Riau. Kesemuanya itu untuk menuju keadaan daerah Riau di era baru masa depan yang lebih baik.

Penulis sendiri mengidentifikasi ada beberapa issue penting yang harus segera diatasi oleh kepemimpnan pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian di Asia Tenggara 2020, antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang kurang bersih, kinerja yang lemah, dan kurang keterbukaan;
2. Pengelolaan anggaran pembangunan yang tidak transparan dan sulit dipertanggung jawabkan kualitas dan kapabelitasnya;
3. Lembaga pengawasan yang lemah kinerjanya dan kurang dipercaya;
4. Birokrasi termasuk badan dan Dinas daerah yang masih membengkak dan tidak efisien;
5. Manajemen pembangunan yang masih amburadul atau tidak profesional;
6. Tumpang tindih dan saling bertentangannya masing-masing PERDA termasuk pruduk hukum yangh lebih tinggi;

7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
8. Rendahnya SDM dan disiplin pegawai pemerintah dan masyarakat dalam berusaha;
9. Tidak terpadunya pemerataan dengan pertumbuhan ekonomi;
10. Kurangnya bargening dengan Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi khusus;
11. Kecilnya kontribusi sektor swasta besar kepada daerah;
12. Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam dan potensi masyarakat;
13. Belum memadainya data dan infomasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan implementasi program pembangunan (dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan, POLDA, Master Plan, PROPEDA; PROTADA, dll);
14. Pembangunan belum didasarkan karakteristik potensi alam dan potensi masyarakat yang dimiliki daerah sehingga belum jelasnya daerah-daerah mana sebagai basis pengembangan dan keunggulan kepetitif pada dibidang apa.
15. Kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa didominasi cara yang tradisonal dan sedikit penerapan ilmu dan teknologi artinya perlu pengembangan dan moderniasi;

16. Kurang membuka kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Kabupaten/ Kota dengan daerah Kabupaten/Kota Provinsi lain dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan hubungan dagang;
17. Kurang membuka kerjasama dengan Negara Anggota AFEC, NAFTA, WTO, GAAT, MEE, khususnya dalam menarik minat investasi dan perdagangan.

Jika diurut masih ada sederetan angka lagi yang mengidentifikasikan masih banyaknya persoalan yang harus diatasi pemimpin daerah otonom Riau dalam rangka mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian di Asia Tenggara 2020 yang sama artinya dengan diatas pertumbuhan ekonomi Negara Singapura sebagai Salah satu Negara dari lima Negara Paling termakmur di Dunia.

Visi dan misi ini akan mendekati kenyataan apabila semua pihak: pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat memiliki komitmen dan dapat bekerjasama yang saling menguntungkan dan adil. Terutama dalam kegiatan produksi dan distribusi dengan memanfaatkan potensi alam dan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Tentunya apbila dapat mewujudkan dan mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dari potensi yang dimiliki yaitu dimulai daru ukuran cm, m, km dan seterusnya dari luas lahan dan potensi kelautan dimanfaatkan pemerintah daerah,

pihak swasta dan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan perdagangan secara professional, ekonomis dan berteknologi tinggi.

3. Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Daerah yang Kontekstual

Dalam tahap pengembangan dan penerapannya, ternyata konsep perencanaan strategis telah memberikan napas baru dan darah segar pada organisasi publik dan nirlaba (sektor ketiga). Bryson (1991:49) menyatakan bahwa manakala perencanaan strategis diterapkan secara tepat dalam lingkungan publik dan nirlaba, perencanaan strategis memberikan sekumpulan konsep, prosedur, dan alat untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi. Selanjutnya Bryson (1991:50) menyatakan pula bahwa proses perencanaan strategis yang responsif terhadap situasi yang berbeda dalam sektor publik dan nirlaba harus dikembangkan dan diuji.

Beberapa konsep manajemen dan perencanaan strategis yang telah dikembangkan di organisasi sektor swasta, publik dan nirlaba (sektor ketiga) sebagaimana yang dikemukakan di atas, ternyata dapat dijadikan landasan penelitian pada organisasi sektor publik. Tampa terkecuali termasuk pula pada organisasi yang lebih spesifik dan kecil lagi. Maksudnya, selain mengembangkan dan menguji, dimaksudkan pula untuk menemukan kendala-

kendala, modifikasi dan penyesuaian. Sehingga diharapkan penggunaannya lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan perencanaan yang dipraktekkan sekarang yang masih dirasakan terlalu sentralistis (*top-down*).

Sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan daerah yang kontekstual tersebut apabila diterapkan pada perencanaan pembangunan daerah akan lebih efektif dan efisien. Dengan pertimbangan bahwa konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan daerah yang kontekstual memberikan nilai tambah, yaitu : *Pertama*, memperlihatkan adanya reformasi administrasi dalam perbaikan sistem perencanaan pembangunan yang selama ini telah dipolakan dalam peraturan perundangan; *Kedua*, perencanaan pembanguan daerah dirumuskan atas dasar nilai efektivitas dan efisiensinya bukan atas dasar kepentingan; *Ketiga*, pendekatan pembangunan daerah dirasakan lebih kontekstual dengan anggapan bahwa faktor-faktor lingkungan adalah penting, mengingat selama ini faktor-faktor lingkungan kurang dipertimbangkan; *Keempat*, dalam proses pembangunan daerah menekankan kepada adanya proses pembelajaran kepada masyarakat lokal; dan *Kelima*, dengan sistem terbuka perencanaan strategis selalu berusaha menjaga keberadaan dan keberlanjutan melalui kestabilan situasi dan kondisi internal dan eksternal secara proporsional (komparatif), holistik, intrasektoral, dan fungsional.

Paling tidak ada sembilan tipelogi atau karakteristik daerah di Provinsi Riau yang masing-masingnya menggambarkan potensi alam dan potensi masyarakatnya. Dengan demikian strategi pembangunan yang seharusnya dikembangkan adalah dengan sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan potensi Daerahnya masing-masing, yaitu : potensi persawahan, potensi perladangan, potensi perkebunan, potensi peternakan, potensi perikanan, potensi industri besar dan sedang, potensi industri kecil dan kerajinan, potensi jasa, poelabuhan dan perdagangan, dan potensi pariwisata.

Pembagian tipelogi berdasarkan karakteristik daerah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan daerah di Provinsi Riau hanya kepada spesialisasi produksi, melainkan atas dasar supaya adanya kecocokan strategi dan proritas program pembangunan yang dikembangkan dengan potensi alam dan potensi masyarakat yang sebenarnya, dalam rangka pembangunan daerah yang kontekstual.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah yang dianggap lebih efektif dan efisien karena lebih kontekstual adalah suatu sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan daerah yang kontekstual.

A. Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Riau, lebih menitikberatkan pada ekstrapolasi masa lampau. Para perencana di berbagai tingkatan, mulai dari Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa, Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan (Rapat UDKP), Foroum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi, selalu meninjau kembali hasil mereka dari satu atau lima tahun sebelumnya dan memproyeksikan pola yang sama untuk satu atau lima tahun berikutnya, dengan membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan yang mereka ketahui akan terjadi kelak. Praktek perencanaan semacam ini jelas mengabaikan dinamika organisasi, karena setiap saat organisasi selalu berubah sebagai akibat tuntutan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang tidak mungkin dapat dielakkan dan beberapa perubahan lain sebagai hasil dari usaha kreativitas manusia.

Melakukan penyesuaian-penyesuain dengan tuntutan lingkungan tidak mungkin harus menunggu satu atau lima tahun yang akan datang. Proses perencanaan yang efektif harus secara proaktif ditujukan untuk mengantisipasi beberapa perubahan yang tidak bisa dielakkan dan beberapa perubahan lain sebagai usaha kreativitas manusia.

Dengan demikian sudah saatnya secara bertahap sistem terbuka perencanaan strategis yang berorientasi kepada

kualitas, keilmuan, dan kelompok secara bersungguh-sungguh diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berorientasi kepada kualitas maksudnya perencanaan strategis menciptakan dan mengembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang akan membuat setiap orang mengetahui bahwa kualitas fisik, mental, moral, pendidikan, teknis, dan kualitas pengalaman, serta kualitas hasil adalah tuntutan yang paling utama. Berorientasi kepada keilmuan maksudnya perencanaan strategis mendasarkan diri kepada bahwa semua tugas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial dapat dan harus dianalisis melalui metode ilmu pengetahuan yang mencakup observasi, pengumpulan data, analisis, pengujian dan implementasi aktual. Berorientasi kepada kelompok (tim) maksudnya perencanaan strategis dapat mengkondisikan setiap orang untuk berperilaku dan berkerjasama sesuai dengan tuntutan organisasi atau terciptanya sistem sosial yang kooperatif.

Mensikapi perkembangan perencanaan pembangunan daerah di Riau sampai saat ini, justru data dan informasi bagi para pengambil keputusan sungguh tidak memadai, sehingga model pembangunan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi objektif (kontekstual) yang sebenarnya.

Data dan informasi yang ada di Pedesaan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, secara berurut sama kurang lengkapnya. Dengan demikian informasi yang ada tidak memadai untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan strategis pembangunan. Akibatnya

rencana-rencana strategis jangka panjang, menengah dan pendek untuk efektivitas manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan organisasi, meliputi : prumusan misi, tujuan spesifik, strategi-strategi, dan kebijakan, program, dan proyek belum dirumuskan secara sistemik dan terpadu.

Praktek selama ini dalam pertemuan Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (MUSBANGDES) dan Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan (Rapat UDKP). Tergambar dengan jelas bahwa dalam proses pengambilan keputusan, waktu presentasi atau penyampaian usulan dari setiap perwakilan sangat singkat, sekitar 10 menit, sedangkan materi usulan rencana pembangunan cukup banyak, sehingga tidak semua materi dapat tersampaikan untuk dibahas. Selain itu, dalam pembahasan materi usulan setiap perwakilan RT, RW, dan Dusun bertahan dengan argumentasinya untuk menggolkan usulan rencana pembangunan yang menjadi prioritasnya.

Demikian pula dalam forum Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan, setiap Desa berusaha pula menggolkan usulan yang disampaikannnya. Suasana yang demikian terjadi pula pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tarik menarik kepentingan antara RT, RW, Dusun, Desa, Dinas dan Badan Daerah, membuat Musyawarah Pembangunan di semua tingkatan terasa kurang efektif. Tampak dengan jelas persipan rapat perumusan rencana

strategis pembangunan kurang matang, metode dan mekanisme rapat tidak jelas, data dan informasi yang mendukung setiap usulan rencana strategis pembangunan tidak pula tersedia secara lengkap dan akurat. Hal yang demikian terus saja terjadi berulang-ulang disetiap tahun penyusunan rencana pembangunan, tanpa ada perubahan dan peningkatan yang berarti.

Sebahagian besar program dan proyek yang diusulkan dan disetujui dalam APBN, APBD Provinsi dan ABPD Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan potensi, harapan, keinginan dan kebutuhan kondisi objektif masyarakat setempat. Sesunguhnya yang menjadi harapan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, adalah membutuhkan modal dan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas usaha. Dalam kenyataannya program dan proyek yang direncanakan tidak memakai sekala prioritas, justru hanya didominasi pembangunan fisik, dan ternyata kurang produktif untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Justru program dan proyek tersebut hanya memberi keuntungan kepada para pelaksana dan para pejabat di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan. Antara bobot dan kualitas hasil program dan proyek dilapangan tidak sesuai dengan jumlah anggaran program/proyek yang telah disediakan. Maksudnya, disini telah terjadi kebocoran dana pembangunan, sebagai akibat lemahnya dalam fungsi pengawasan.

B. Implementasi Program Pembangunan Daerah

Dalam praktek pembangunan daerah di Riau selama ini tergambar dengan jelas bahwa pengorganisasian sumber daya organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan prosedur dalam implementasi program pembangunan daerah belum terorganisir dengan baik. Hal ini terjadi, karena ditenderkan kepada tim pelaksana program dan proyek pembangunan fisik kepada kontraktor dan program khusus kepada PLP atau tim pelaksana program yang ditunjuk pimpinan program atau proyek (pimpro) Dinas Daerah, Kantor atau Badan yang mengadakan program atau proyek pembangunan. Justru dalam kenyataannya di lapangan, mereka ini kurang memahami situasi dan kondisi masyarakat tempatan.

Dominasi kekuasaan kontraktor dan PLP atau tim pelaksana program, terkadang yang membuat masyarakat penerima program pembangunan menjadi apatis. Selalu mengikut dan menerima saja tampa ada kritikan dan memberikan informasi yang berharga kepada tim atau personil pelaksana program. Terkesan masyarakat sudah muak dengan campur tangan yang berlebihan dari aparatur (*agen)* pembangunan sebagai pelaksana program atau proyek.

Dalam pembangunan fisik, selain proses tender kepada kontraktor yang tidak transparan dan berbau korupsi, kolusi,

dan nepotesme. Sebahagian besar pelaksana program atau proyek tidak membawa serta masyarakat setempat. Dengan demikian suatu program pembangunan antara yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasinya berbeda-beda, dan tidak jelas prosedur dan tanggung jawabnya.

Dari berbagai informasi ternyata dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan fisik, sebahagian dananya ternyata telah dipotong oleh pimpro yang mentenderkan proyek sebesar antara 20 % – 40 %. Dengan demikian pelaksana proyek terpaksa harus mengurangi bahan-bahan pembangunan proyek, karena kontraktor juga ingin mendapatkan keuntungan. Pemotongan dana proyek pembangunan ini mengakibatkan kualitas proyek menjadi rendah.

Program khusus melalui Inpres atau S.K. Bersama Menteri, misalnya Program Inpres Desa Tertinggal dan Jaring Pengaman Sosial atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dalam praktek prosesnya dibuat tidak transparan sehingga ada Camat, Kepala Desa, Tim Pelaksana, Tim Pendamping, atau Ketua Kelompok Masyarakat memotong sebahagian dana program atau proyek untuk biaya resmi (honor, uang jalan, uang sidang, dll) atau biaya tidak resmi (uang seminar, dll). Sebenarnya dana tersebut harus disalurkan kepada anggota kelompok secara utuh tanpa pemotongan, karena dana administrasi telah disediakan dalam program tersebut.

Effendi, dkk., (1989:17) menyatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah besar dana Inpres program khusus digunakan untuk kepentingan insentif bagi pelaksana baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Dana insentif pelaksana ini menyerap1/3 dana Inpres, dan justru digunakan bukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Dalam proses pembangunan masyarakat tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam bersikap dan menentukan program dan proyek pembangunan. Para pimpinan diberbagai level dan tokoh masyarakat tidak berfungsi menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan program dan proyek pembangunan. Peranan masyarakat lokal hanya diberikan dalam hal menyediakan lahan atau lokasi proyek pembangunan dan mendata anggota masyarakat sebagai kelompok sasaran yang menerima bantuan. Sementara bagi masyarakat tidak jelas siapa yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program atau proyek pembangunan tersebut. Kenyataannya realisasi program atau proyek pembangunan tersebut tidak tepat sasaran dan kurang berkualitas. Sebagai contoh program sarana air bersih yaitu proyek penyediaan bak air MCK (mandi, cuci dan kakus) dalam jangka waktu lima atau enam bulan sudah retak bahkan bocor. Agaknya memang demikian diciptakan, supaya tahun anggaran berikutnya diharapkan ada proyek renopasi, melanjutkan, atau membangun baru. Contoh yang lain adalah tidak bergulirnya dana IDT, dengan demikian tujuan semula

program IDT tidak tercapai yaitu dalam jangka waktu tertentu penerima pertama harus menggulirkan dana IDT kepada kelompok yang lain.

Atas dasar penilaian masyarakat ternyata program dan proyek pembangunan daerah hanya untuk diproyekkan disetiap tahun anggaran dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada sekelompok orang yang mendapatkan akses langsung kepada pihak pengambil keputusan.

Sejak awal, perencanaan program/proyek pembangunan memang sangat sentralistis karena program tersebut bersifat nasional dan dibiayai dengan anggaran pemerintahan Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta disalurkan melalui bank-bank nasional. Intruksi Presiden dan Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dari atas mengatur prosedur pelaksanaan secara detail. Beribu-ribu rencana program atau proyek dari Desa dibawa ke Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk dimintakan persetujuannya, karena memang merekalah yang memiliki anggaran dalam APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Kota.

Dari deskripsi di atas, bila kita kembalikan pada kriteria teoritis, maka secara singkat terlihat bahwa program dan proyek tersebut dilihat dari struktur dan proses, pelaksanaan dan pengelolaan program dan proyek sangat bersifat sentralistis (*top-down planning*), birokrasi sangat tinggi dan penuh regulasi.

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan sentralisasi penyusunan dan pelaksanaan program adalah disebabkan pemerintahan dearah yang berotonomi belum optimal menggali dan mengelola sumber dana sendiri, meskipun sumber-sumbernya ada, dalam rangka pembiayaan program pembangunannnya. Dengan demikian, pemerintahan daerah tidak pernah atau belum optimal menyusun anggaran pembangunannya dalam APBD.

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah, terutama dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, sangat diperlukan peranan tokoh pimpinan formal dan informal sebagai figur kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang memahami situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga memahami betul kapan saatnya dan dimana tempat yang tepat untuk melakukan tindakan (*action*).

Selain kepemimpinan, dalam menggerakkan masyarakat diperlukan pula kegiatan memotivasi dan komunikasi yang baik. Tentunya kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang tidak memberikan contoh perbuatan yang tercela, bermoral yang baik, mendahulukan kepentingan orang banyak dari kepentingan pribadi, mengayomi dan memiliki otos dan semangat kerja yang tinggi, berkerja keras, jujur dan berlaku adil.

Dalam pembangunan daerah di Provinsi Riau ke depan, figur kepemimpinan yang bertanggungjawab yang selalu didambakan dan diharapkan masyarakat daerah. Untuk mendapatkan pemimpin yang demikian, perlu proses pemilihan kepala daerah yang transparan, demokratis dan tanpa campur tangan dari Pemerintah Pusat dan kelompok kepentingan serta bebas KKN. Disinilah letak arti pentingnya pembangunan sosial terutama dalam mengaktualisasi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi dalam pembangunan. Selain itu diperlukan pula pembinaaan sumber daya manusia aparatur Pemerintah melalui pendidikan lanjutan, kursus-kursus dan pelatihan.

Dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah tidak jelas pula siapa yang melaksanakannya, sebagai contoh yang telah dikemukakan misalnya banyak program dan proyek yang tidak berkualitas, namun tidak pernah ada tindakan tegas untuk memperbaiki. Kenyataannya masyarakat tidak mengerti dan masih takut kepada siapa dan bagaimana caranya untuk melaporkan kegiatan program dan proyek yang tidak berkualitas atau menyimpang tersebut, termasuk kekayaan pejabat daerah yang patut dicurigai. Keberadaan DPRD yang diharapkan memberikan kontrol terhadap jalannya program dan proyek ternyata tidak berfungsi dengan optimal, karena keberadaan lembaga tersebut hanya lebih meutamakan kepentingan pribadi, kelompok, disamping belum diberdayakan.

Hanya LSM dan Mahasiswa yang masih punya hati nurani memperjuangkan hak-hak rakyat dan penyimpangan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas tentang berbagai faktor yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi program pembangunan daerah, telah memberi ketegasan bahwa diperlukan proses pembelajaran antara masyarakat lokal dengan birokrat dalam pembangunan. Maksud gagasan ini adalah supaya program-program pembangunan diarahkan kepada peningkatan kapasitas organisasi dan masyarakat lokal untuk mampu melaksanakan program/proyek pembangunan secara mandiri. Dengan demikian, melalui proses pembelajaran dan pembinaaan dari Pemerintah yang telah memiliki sumber daya manusia yang memadai diharapkan pula pada suatu saat organisasi dan masyarakat lokal akan mandiri dan berdaya.

Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Pemerintah Daerah memberikan dukungan sumber dana pembangunan kepada kelompok usaha masyarakat melalui lembaga-lembaga perekonomian daerah yang sudah dibentuk secara mapan, misalnya KUD dan Bank Pembangunan Daerah atau BPR. Dalam waktu yang bersamaan organisasi dan masyarakat lokal terus menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan pembangunan. Dengan demikian strategi pembangunan jangka panjang melalui otonomi Daerah yang berswadaya dan mandiri diharapkan

dapat memberdayakan masyarakat (*empewerment people*) di daerah. Sehingga masyarakat lebih mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Secara tidak langsung partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat pula.

4. Beberapa Bidang Pembangunan yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan tingkat perkembangan pembangunan daerah di Riau, apabila dirincikan berdasarkan bidang pembangunan, memperlihatkan bahwa perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah pada bidang kualitas sumber daya manusia belum optimal. Sesungguhnya program peningkatan S.D.M di daerah tidak saja ditujukan kepada kedisiplinan dan penguasaan atau pemahaman materi pekerjaan dan pelayanan yang diberikan aparatur, melainkan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha meningkatkan pendapatan perkapitanya.

Perbaikan faktor manusia (*human factor*) memberikan kontribusi yang besar bagi percepatan laju pembangunan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial.

Demikian pula dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan menghidupkan

dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mendukung perekonomian masyarakat. Misalanya KUD, Bank Pembangunan Daerah atau BPR, Pasar dan pengadaan sarana produksi dan distribusi Daerah. Apabila semua masyarakat usahanya sudah diwadahi oleh KUD yang didukung pula dengan pengadaan sarana produksi dan distribusi, sementara Bank Pembangunan Derah atau lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit untuk modal usaha dan modal kerja maka diharapkan masyarakat lebih akses dan berdaya dalam berusaha.

Penumpukan produksi dapat pula diatasi apabila KUD dan berbagai lembaga perekonomian lainnya benar-benar berfungsi tidak saja sebagai wadah produksi, melainkan juga sebagai penyalur (distribusi) produk daerah ke pasar lokal, regional bahkan ke pasar Internasional.

Dukungan Pemerintah yang sangat dibutuhkan di sini adalah pembinaan lembaga perekonomian dan dukungan (*support*) dana yang dititipkan pada lembaga KUD atau lembaga keuangan (Bank Perkeriditan Rakyat). Alternatif ini perlu lilakukan, karena pengalaman telah membuktikan bahwa dana yang disalurkan melalui berbagai program/ proyek ternyata kurang efektif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di daerah sebagaimana maksud dan tujuan program/proyek diadakan. Sebagai akibat dari proses dan struktur program/proyek terlalu birokratis dan regulasi. Selain dari itu, dukungan Pemerintah diperlukan pula

dalam hal memberi informasi produk daerah apa saja yang dibutuhkan pasar lokal, regional dan pasar Internasional.

Secara umum pembangunan di bidang fisik khususnya penyediaan sarana dan prasarana di daerah belum pula optimal. Misalnya, yang hampir terlupakan adalah pengadaan fasilitas dan perangkat pendukung pelatihan kerja kepada petani dan nelayan. Selain bertujuan meningkatkan kemampuan petani dan nelayan pelatihan ditujukan pula kepada proses pengenalan dan adaptasi teknologi baru terhadap teknologi dan budaya kerja setempat. Tidak mungkin petani dan nelayan kita akan mencapai taraf kemajuan yang lebih baik tanpa menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi dalam berusaha tani, meskipun telah didukung oleh sarana dan prasarana umum yang memadai.

Selanjutnya, dalam bidang pembangunan lingkungan hidup di daerah ternyata hasilnya belum pula optimal. Masih terdapat beberapa faktor kerusakan lingkungan, khususnya tanah pedesaan di Riau yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Kerusakan karena faktor alam banyak disebabkan oleh gelombang pasang terutama Desa-desa pesisir dan pantai. Sedangkan kerusakan karena faktor ulah manusia disebabkan oleh sikap yang berlebihan dari perusahaan (investor) dalam pembukaan lahan perkebunan. Mengakibatkan gundulnya hutan yang berdampak pada tingkat erosi tanah yang cukup tinggi.

Faktor kerusakan tanah yang lain disebabkan adat atau tradisi pembagian tanah warisan, sehingga lahan menjadi sempit dan kurang produktif (*pregmentatie*), tanpa ada usaha membuka lahan baru yang lebih luas.

5. Arti Penting Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan Daerah yang Kontekstual

Arti penting sistem perencanaan strategis dalam pembangunan daerah yang kontekstual dimasa mendatang orientasinya tidak saja ditujukan kepada mengejar pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi secara bersamaan tercipta pula pemerataan pendapatan dan hasil-hasilnya. Banyak negara berkembang termasuk Indonesia gagal mengatasi masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai akibat tidak meratanya pembagian sumber-sumber produksi. Sekelompok orang dengan mudahnya memiliki dan menguasai faktor produksi yang diperoleh dari sumber kekayaan negara sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang keliru. Ini disebabkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada sekelompok konglemerat yang dianggap memiliki peran lebih besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Di pihak lain, mayoritas masyarakat usaha menengah, kecil dan koperasi tidak memperoleh akses dan kesempatan mendapatkan sumber-sumber produksi yang dikuasai negara akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Strategi pembangunan yang berpihak kepada rakyat banyak (ekonomi kerakyatan) yang hanya menguasai usaha menengah dan kecil sudah sangat mendesak dilaksanakan. Melalui kebijakan perampingan birokrasi dan deregulasi diberbagai peraturan, misalnya dalam pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada usaha kecil dan ekonomi lemah harus lebih dipermudah. Jika Pemerintah benar-benar ingin mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ketidak adilan ekonomi dalam pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Pembangunan untuk rakyat harus dilaksanakan dengan strategi memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian sasaran pembangunan dalam arti yang luas, tidak saja pencapaian produktivitas melainkan juga secara bersamaan tercapai pula pemerataan hasil dan keseimbangan pembangunan diberbagai bidang: politik, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hendaknya tidak saja dalam bentuk sumbangan pemikiran dan tenaga, melainkan juga pada peningkatan partisipasi sumbangan dana. Pada saat ini yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana mengelola partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana.

Dalam persekutuan masyarakat dari bentuk negara sampai masyarakat yang terkecil sebenarnya sumbangan dana dibenarkan dan penting artinya dalam pembangunan.

Dalam sistem Pemerintahan Islam sumbangan tersebut merupakan kewajiban bagi orang yang kaya berupa zakat, infak atau sodaqah kepada orang–orang yang tidak mampu. Sumbangan tersebut dapat diberikan secara langsung atau melalui Pemerintah (penguasa) atau badan amal (amil zakat) yang kemudian disalurkan dalam bentuk program pembangunan yang bermanfaat.

Demikian pula Desa yang merupakan bagian wilayah Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah desa yang mampu menyelenggarakan pembangunan atas dasar kemampuan keuangannya sendiri. Untuk penggalian sumber-sumber keuangan desa tentunya diperlukan kewenangan yang lebih besar. Dalam peraktek pemerintahan di Indonesia sumber-sumber daerah banyak di pungut pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan sebahagian besar dananya masuk ke kas Kabupaten/Kota. Contoh lain adalah keberadaan perusahaan negara dan perusahaan swasta besar di pedesaan. Secara resmi tidak ada penghasilan perusahaan besar tersebut yang masuk ke kas Desa. Mungkin secara tidak resmi bantuan perusahaan besar tersebut langsung diberikan kepada aparatur atau tokoh masyarakat pedesaan, dengan maksud supaya mereka tidak mengalami kesulitan menghadapi kritikan masyarakat Desa dari kebijakan perusahaan yang merugikan kepentingan masyarakat setempat. Sebagai contoh adalah program

bantuan ternak sapi dan perjalanan ke tanah suci dari PT. RAPP melalui Departemen *Community Development* (CD) kepada masyarakat Desa Pangkalan Kerinci. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, ternyata program bantuan ternak sapi diantaranya ada yang diberikan kepada mereka yang secara ekonomis sudah mapan, misalnya diberikan kepada ketua KUD atau pengurus pasar. Sedangkan sebahagian masyarakat lain yang sangat membutuhkannya tidak mendapatkan bantuan program tersebut. Ini artinya ada proses dalam pembagiannya tidak transparan dan tidak adil. Sedangkan program perjalanan ke tanah suci, salah satunya diberikan pula kepada Kepala Desa, ini menunjukkan program bantuan tersebut tidak jelas tujuan, sasaran dan manfaatnya. Dengan demikian cukup kuat alasan bahwa perusahaan hanya ingin menyenangkan dan membungkam kritikan dari anggota masyarakat yang memiliki posisi kuat (*bargening pocition*) yang diperkirakan dapat membahayakan keberadaan perusahaan tersebut di pedesaan.

Pada sisi yang lain, hasil keuntungan perusahaan sebahagian besar justru disetor pula ke Pemerintah Pusat melalui berbagai peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap perusahaan, selain itu perusahaanpun seakan-akan tidak ada kewajiban untuk berhubungan dengan pemerintah daerah, tidak terbuka dalam manajemennya dan tidak jelas konstribusinya kepada daerah. Sebenarnya apa yang hilang dan yang diperoleh masyarakat dari

keberadaan perusahaan besar tersebut, tidak lain adalah : *Pertama*, masyarakat akan kehilangan lahan pertanian; *Kedua*, masyarakat mendapatkan limbah perusahaan; dan *Ketiga*, masyarakat termarjinalkan.

Dimasa yang akan datang, pemerintahan daerah yang berotonomi, tentunya sangat memerlukan sumber-sumber dan penghasilan yang memadai. Apabila pemerintahan yang berotonomi ini tidak dapat melaksanakan kewenangannya dan kewajibannya secara baik, maka akan menimbulkan krisis partisipasi bahkan perlawanan dari masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Atas dasar logika bahwa apsek perencanaan pembangunan daerah harus pula disertakan dengan penyusunan APBD. Dimasa yang akan datang salah satu faktor terpenting yang perlu direformasi dalam rangka proses pembelajaran menuju pemberdayaan masyarakat, sudah sangat mendesak pemerintahan daerah perlu menata kembali sistem anggaran pendapatan dan belanja pembangunannya supaya lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang salah satu faktor yang terpenting adalah bagaimana suatu sistem terbuka perencanaan strategis pembangunan yang disertakan dengan penyusunan anggaran yang transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bukan hanya sekedar diterima DPRD, sebagai suatu perwujudan otonomi Daerah yang berswadaya.[]

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DI ASIA TENGGARA

Perlu ada perubahan arah kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Riau ke depan. *Pertama,* pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan demokrasi politik; *Kedua*, pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu pemberdayaan koperasi, kemitraan usaha, anti monopoli, oligopoli dan kartel, pengaturan lahan pertanian, peningkatan permodalan, pengembangan teknologi, pengaturan distribusi dan pemasaran; *Ketiga,* pembangunan sumber daya manusia dan *Keempat*, penyelenggaraan otonomi dan perimbangan keuangan Pusat dengan Daerah.

Pembangunan demokrasi politik terutama dalam hal prakarsa, daya kreasi dan hak-hak politik masyarakat Daerah belum dapat terekspresikan dengan baik. Demikian

pula dalam hal partisipasi individu dan masyarakat daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Keberadaan Pemerintah dengan kebijakan dan misinya tersediri telah membuat masyarakat daerah tidak ada pilihan kecuali hanya mengikut. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencari penyesuaian antara keinginan arus bawah dengan keinginan pihak atas, tidak lain adalah dengan mengembangkan demokrasi politik. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan sekaligus mengurangi campur tangan yang berlebihan dari Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan. Disinilah arti pentingnya pembangunan demokrasi politik di daerah dimasa yang akan datang.

Di Riau dalam hal pembangunan ekonomi kerakyatan belumlah dapat dikatakan berhasil. Pembangunan perekonomian masyarakat di Riau telah menimbulkan dampak terjadinya kesenjangan sosial dan kesenjangan tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Misalnya, Provinsi Riau sebagai penyumbang pendapatan nasional terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk hasil minyak bumi perkapita sebesar Rp. 3.092.700, (urutan kedua di Indonesia) dan PDB tidak termasuk minyak Rp. 510.900,- perkapita (urutan kelima di Indonesia). Namun, disisi yang lain pengeluaran rata-rata perkapita penduduk daerah hanya sebesar Rp. 147.700,- (urutan ke-24 di Indonesia).

Dengan demikian ada sekelompok kecil masyarakat sebagai pemilik perusahaan pertambangan, perkebunan, industri pengolahan (*manufactur*) kayu lapis, telah meraih keuntungan dengan pendapatan perkapita yang cukup tinggi atas sumber-sumber kekayaan alam di Riau, sedangkan sebahagian besar masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan pendapatan perkapitanya cukup kecil.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 1999) pada laporannya mengungkapkan bahwa tahapan keluarga sejahtera penduduk Riau dalam persentase adalah: prasejahtera (6,84%), sejahtera I (29,18%), sejahtera II (37,32%), sejahtera III (20,76%), dan sejahtera plus (5,9%). Angka ini menunjukakan bahwa belum meratanya pendapatan masyarakat dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAPPEDA Provinsi Riau (1999) dalam laporannya mengungkapkan pula bahwa di Provinsi Riau masih terdapat 460 Desa tertinggal dan penduduk dibawah garis kemiskinan sejumlah 436.859 orang (9,5%) dan setelah terjadinya krisis ekonomi penduduk dibawah garis kemiskinan di Riau pada tahun 2000 bertambah mencapai 1.779631 orang (42,45 %). Dengan meningkatnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Riau, membuktikan bahwa hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat sampai lapisan terbawah (*trickle-down effect*) yang melekat pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) ternyata tidak

terwujud bahkan yang terjadi justru kesenjangan semakin melebar.

Dengan demikian, paling tidak kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Riau dimasa mendatang mengarah kepada : pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan demokrasi politik, dan pembangunan ekonomi berakar kepada kerakyatan.

1. Pembangunan Demokrasi Ekonomi Bergandengan Dengan Demokrasi Politik

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat supaya dapat berkesinambungan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untuk kemajuan diri termasuk menggunakan hak-hak politiknya. Prakarsa itu hanya akan tumbuh apabila ada kesempatan yang sama dan berkeadilan kepada setiap masyarakat dalam proses pembangunan.

Atas dasar pandangan perlu adanya daya prakarsa dan kreasi masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pembangunan harus tercipta sedemikian rupa sehingga ada kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri setiap individu dan masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja, melainkan termasuk kepada semua bidang pembangunan : ekonomi, politik, sosial budaya dan

hankam. Singkatnya, kemajuan ekonomi suatu masyarakat tidak akan mampu bertahan, tanpa adanya pembangunan demokrasi politik dalam masyarakat tersebut.

Pembangunan sosial (*social building*) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem sosial yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif atau manusia berprestasi, termasuk pula sikap mental masyarakat dan aparatur Pemerintah.

Selama ini pembangunan hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan mengabaikan faktor-faktor non fisik yang justru memiliki potensi yang cukup besar untuk keberhasilan pembangunan. Smith dan Mill (Todaro, 1995:391) menyatakan dalam pembangunan ekonomi perlu pula memperhitungkan faktor non ekonomi yaitu kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat istiadat, budaya usaha dan corak kelembagaan masyarakat.

Pembangunan daerah di Riau termasuk gagal dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai akibat tidak meratanya pembagian sumber-sumber produksi. Sekelompok orang dengan mudahnya memiliki dan menguasai faktor produksi yang diperoleh dari sumber kekayaan negara dan Daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah terlalu berlebihan dan berpihak kepada sekelompok konglemerat yang dianggap memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian. Di

pihak lain, mayoritas masyarakat usaha menengah, kecil dan koperasi tidak memperoleh akses dan kesempatan mendapatkan sumber-sumber produksi yang dikuasai negara dan Daerah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Strategi pembangunan yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) yang hanya menguasai usaha menengah dan kecil sudah sangat mendesak dilaksanakan, melalui kebijakan parampingan birokrasi dan deregulasi diberbagai peraturan, misalnya dalam pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada usaha kecil dan ekonomi lemah harus lebih dipermudah. Tentunya, jika Pemerintah Daerah benar-benar ingin mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam pembangunan dimasa yang akan datang.

Pada periode pembangunan selama pemerintahan orde lama berkuasa yang mengutamakan pembangunan politik sampai kepada lapisan terbawah di pedesaan, pada kenyataannya telah gagal menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Demikian pula dengan pengalaman selama pemerintahan orde baru berkuasa, juga dianggap telah gagal karena terlalu memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat semata dalam rangka mengejar pertumbuhan. Oleh karena itu sungguh sangat tepat di era reformasi yang juga dalam waktu yang bersamaan sedang mengalami krisis ekonomi, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan perubahan strategi pembangunan daerah

dari strategi mengabaikan aspek pembangunan demokrasi politik menuju kepada strategi pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan pembangunan demokrasi politik.

2. Pembangunan Ekonomi Berakar Pada Kerakyatan

Sebagai akibat penerapan secara bulat konsep ekonomi liberal kapitalis, tanpa menyesuaikan dengan peradaban sosial budaya masyarakat daerah di Provinsi Riau, ternyata kemajuan-kemajuan ekonomi daerah di Provinsi Riau dianggap telah gagal, karena hanya menguntungkan sebahagian kecil individu dan kelompok dalam masyarakat.

Sebagai akibat kebijakan pembangunan yang keliru tersebut, ternyata sekelompok individu dalam masyarakat yang tinggal di ibu kota sudah baik keadaannya, secara ekonomi lebih mampu dan dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan Daerah Provinsi Riau. Sebahagian kecil jumlah masyarakat ekonomi kelas atas selalu mendapat peluang dan kesempatan yang lebih luas bila dibandingkan dengan mayoritas masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di daerah kumuh atau kantong kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin bahkan menjadi lebih miskin lagi.

Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Kalau demokrasi ekonomi

dijabarkan maka bermakna produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Kemakmuran yang hendak dicapai haruslah kemakmuran atas dasar keadilan sosial.

Dewasa ini masalah yang masih mengganjal bagi pembangunan demokrasi ekonomi di Provinsi Riau berdasarkan hasil penelitian yaitu masih adanya ketidakseimbangan kemampuan dan kesempatan berusaha antara pihak-pihak diberbagai lapisan masyarakat antara yang menguasi dengan yang tidak menguasi sumber-sumber produksi. Sudah saatnya dimasa yang akan datang pembangunan ekonomi yang berakar kepada kerakyatan dianggap lebih tepat di terapkan di Provinsi Riau. Selain dapat meningkatkan kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga sebagai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial. Diantara upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah kebijakan debirokratisasi dan deregulasi yang transparan dan seadil-adilnya.

Dalam rangka peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat di daerah Provinsi Riau tidak lain dengan memberdayakannya. Strategi yang dikembangkan

adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan melalui upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan termasuk pula membangun pranata-pranatanya, dalam hal menanamkan nilai-nilai budaya modern misalnya kerja keras, keterbukaan, hemat, dan bertanggung jawab. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial daerah dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya melalui proses pembelajaran.

Pengembangan ekonomi yang berakar pada kerakyatan tetap pula mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu perlu pula mempercepat berbagai proses perubahan dari masyarakat daerah yang masih berpikir dan berprilaku tradisional ke masyarakat modern, dari sistem ekonomi yang subsistem ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan masyarakat terhadap pemberi bantuan menuju kemandirian dan pemberdayaan. Dalam hal ini sasaran ekonomi kerakyatan di daerah tidak lain adalah petani dan nelayan. Dalam kebijakan ekonomi kerakyatan, petani harus diberi hak kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sebagai lahan pertanian, disediakan pula fasilitas kredit

untuk permodalan dan teknologi tepat guna dalam rangka efektivitas berusaha.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan menghidupkan dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mendukung perekonomian masyarakat. Misalanya KUD, Bank Daerah, Pasar dan pengadaan sarana produksi dan distribusi. Apabila semua masyarakat usahanya sudah diwadahi oleh KUD yang didukung pula oleh pengadaan sarana produksi dan distribusi, sementara Bank Daerah atau lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit untuk modal usaha dan modal kerja maka diharapkan masyarakat lebih akses dan berdaya dalam berusaha.

Penumpukan produksi dapat pula diatasi apabila KUD benar-benar berfungsi tidak saja sebagai wadah produksi, melainkan juga sebagai penyalur (distribusi) produk daerah ke pasar lokal, regional bahkan ke pasar Internasional.

Dalam perkembangannya, keberadaan investor di daerah sering menimbulkan konflik antara pemilik modal dengan petani sebagai pemilik lahan. Pada sisi yang lain, keberadaan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pemanfaatan potensi alam dan tenaga kerja sangat diharapkan masyarakat. Jalan tengah yang terbaik sebagai solusinya adalah perencanaan pembangunan harus pula menciptakan kerjasama dan saling ketergantungan (*komensalisma*) anatara investor dan petani.

Efektivitas penerapan teknologi daerah dapat dicapai dengan cara memadukan teknologi sendiri dengan teknologi dari luar, karena dianggap lehih cepat tingkat pemahaman dan diharapkan lebih efektif dan efisien. Upaya penerapan inovasi dan teknologi di daerah, membutuhkan suatu strategi adaptasi antara modernisasi dengan tradisi.

Pendekatan pembangunan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia daerah, dapat dilakukan yaitu melalui penyuluhan, pelatihan, swadaya terpadu dan pembangunan terpadu. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial, karena itu investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan juga kesehatan dan gizi.

Salah satu kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah karena ketidakmampuan Kepala Daerah bersama DPRD dalam menyusun APPD. Dimasa yang akan datang salah satu faktor terpenting yang perlu direformasi dalam rangka proses pembelajaran menuju pemberdayaan masyarakat, sudah sangat mendesak pemerintahan Daerah perlu menata kembali sistem anggaran pendapatan dan belanja pembangunannya supaya lebih berkualitas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Riau yang berakar kepada kerakyatan, ada beberapa faktor penting yang harus dikembangkan di masa yang akan datang, antara lain :

***Pertama*, faktor sumber daya manusia**. Sebagaimana telah diketahui ada dua kelompok pelaku dalam pembangunan yaitu Pemerintah dan masyarakat. Kedua pelaku pembangunan ini adalah sama-sama penting dan memberikan akses bagi pembangunan. Kedua pelaku pembangunan ini sama-sama perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Walaupun dipihak Pemerintah telah cukup memadai kekampuan daya pikir dan nalarnya dalam berkreativitas, namun dipihak masyarakat dirasakan masih banyak kelemahan, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya. Oleh karena itu dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Provinsi Riau, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan, dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam berusaha. Selain itu instansi yang terkait menyangkut masalah kegiatan pertanian harus pula rutin dan lebih serius lagi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan.

***Kedua*, faktor lahan pertanian**. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Provinsi Riau, faktor pemilikan lahan oleh petani sangat penting, dan justru perlu pengaturan, pembagian, dan penataan kembali kepemilikan hak-hak atas tanah. Selain perusahaan-perusahaan besar

Pemerintah (BUMN) dan swasta yang menguasi lahan untuk perkebunan dengan areal yang begitu luas, meskipun hanya dengan hak guna usaha atau hak pakai dan sebahagian lagi penduduk kota yang begitu banyak menguasai lahan yang tidak produktif maksudnya tidak diusahakan, melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan dari hasil jual-beli sebagai pakang tanah. Sementara pada sisi yang lain petani kita yang ingin melakukan kegiatan usaha pertanian tidak mempunyai cukup lahan, sebagai akibat tidak mampu untuk membelinya atau tidak memiliki modal untuk membuka lahan baru. Dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Dinas Pertanahan harus benar-benar melakukan pemetaan, pembagian dan penggunaan lahan pertanian secara transparan dan seadil-adilnya, sehingga lahan-lahan yang tidak produktif dapat diserahkan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau lahannya sangat sempit untuk kegiatan berusaha.

***Ketiga*, faktor permodalan**. Selain masalah lahan pertanian, petani di daerah Provinsi Riau, perlu pula memiliki modal dalam arti dana untuk investasi dan modal kerja. Jika tidak ada dana, sudah barang tentu petani tidak akan mungkin memiliki peralatan, bibit tanaman yang unggul, pupuk, racun hama dan biaya hidup selama kegiatan produksi. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus membuat program bantuan permodalan sebagai upaya mengatasi kesulitan permodalan petani dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Program permodalan

petani untuk kegiatan berusaha, dapat dilakukan Pemerintah melalui kebijakan kredit lunak melalui bank milik Pemerintah Daerah, misalnya melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) dan PT.PER atau program bantuan khusus disalurkan kepada KUD atau Bank Desa yang telah dibentuk dan dibina secara mapan.

***Keempat*, faktor teknologi**. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak modal, pengetahuan khusus dan teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi, misalnya : bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik, kegiatan pertanian diharapkan lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, petani secara menyeluruh harus dapat menikmati penggunaan bibit unggul, pupuk, racun hama, dan perlatan mekanik yang mudah didapat dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh petani. Semua teknologi tersebut seharusnya tetap selalu tersedia, namun dalam kenyataannya di daerah Provinsi Riau teknologi tersebut sangat sulit didapat dan harganyapun relatif cukup tinggi, terutama peralatan mekanik untuk kegiatan pengolahan lahan dan untuk kegiatan pasca panen. Karena itu kebijakan pengembangan dan penemuan baru di bidang teknologi pertanian harus tetap selalu ditingkatkan, dalam rangka produktivitas, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tani. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah Provinsi Riau mau bekerjasama dengan lembaga riset dan

teknologi melalui berbagai perguruan tinggi yang ada di Daerah, misalnya dengan Fakultas Teknik dan Fakultas pertanian UNRI, UIR atau UNILAK.

***Kelima*, faktor distribusi dan pemasaran**. Setelah kegiatan produksi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan distribusi dan pemasaran hasil produksi harus ditata sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa setiap hasil pertanian tetap terjual di pasaran lokal, regional dan internasional. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus menciptakan pengaturan dalam rangka memasarkan produk pertanian di daerah. Pemasaran lokal diserahkan kepada Koprasi Unit Desa dan pemasaran regional dan internasional harus ada koordinasi antara instansi terkait, misalnya: Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Gugus Kendali Mutu, termasuk pula Badan yang mengatur kegiatan Ekspor-Inpor.

***Keenam*, pemberdayaan koperasi.** Perubahan mendasar pada fungsi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan adalah dengan telah dikeluarkannya UU. No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi tidak lagi semata-mata sebagai organisasi ekonomi bertujuan sosial melainkan sebagai organisasi ekonomi yang mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, struktur koperasi termasuk KUD di Provinsi Riau yang selama

ini kurang efektif perlu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Tidak saja perluasan usaha, manajemen yang baik, struktur modal yang kuat sampai kepada peningkatan sumber daya manusia pengurus dan keanggotaannya. Dengan demikian, strategi pemberdayaan koperasi, seharusnya diarahkan kepada : *Pertama*, posisi, peran dan fungsi Pemerintah Daerah haruslah mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas masyarakat melalui koperasi; *Kedua*, meningkatkan kegairahan, kesadaran, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat; *Ketiga*, meningkatkan kemitraan usaha diantara sesama lembaga koperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta dan BUMN lainnya; dan *Keempat*, menciptakan iklim berusaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri.

***Ketujuh*, kemitraan berusaha**. Dalam perkembangan perekonomian masyarakat daerah di Provinsi Riau, sangat dirasakan adanya kepincangan struktural, antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak meratanya pemilikan sumber daya produksi dan produktivitas usaha, serta sistem distribusi dan pemasaran di antara pelaku ekonomi. Untuk memecahkan masalah ini menuntut perlu dilakukannya kemitraan berusaha, dan bukan ketergantungan dan persaingan yang tidak sehat. Kemitraan berusaha yang dimaksud adalah dalam rangka penciptaan hubungan kerja antara pelaku ekonomi yang didasarkan kepada

ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Pengalaman telah membuktikan bahwa dalam berusaha masing-masing pihak tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, atas dasar kelebihan dan kelemahan ini setiap usaha dituntut untuk selalu berkerjasma dan bermitra. Justru disinilah arti penting ekonomi kerakyatan. Usaha yang besar dan usaha kecil saling membutuhkan dan saling bekerjasama dalam rangka mencapai produktivitas dan efisiensi dalam persaingan yang sehat.

Dalam sistem perekonomian yang kita anut sebenarnya tidak ada persaingan bebas yang tidak seimbang, yang ada hanyalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus dapat menunjang usaha yang lain, dan tentunya merupakan bagian dari yang lain. Perusahaan yang besar menopang dan mendorong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar dalam penyediaan berbagai kebutuhan bahan mentah dan lain sebagainya. Pada akhirnya menciptakan suatu totalitas sistem usaha bersama untuk kesejahteraan bersama.

Pengalaman telah membuktikan juga bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan yang maju dan menjadi

besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua berhubungan, terkait dan interdependensi. Model kemitraan berusaha yang dimaksud dapat berupa hubungan yang saling menguntungkan (*komensalisma*), misalnya petani perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menyediakan bahan mentah, sedangkan pabrik selain menyediakan kebutuhan petani sekaligus mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menghasilkan minyak goreng untuk dipasarkan pada pasar lokal, regional dan internasional. Bentuk hubungan kerjasama ini dapat saja diterapkan pada hubungan antara petani dengan KUD yang memiliki pabrik pengolahan barang-barang produksi. Dengan demikian, kemitraaan usaha ini diharapkan pula dapat memberantas atau mengurangi kegiatan monopoli dan oligopoli dari sekelompok orang yang perekonomiannya yang sudah sangat kuat dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam kemitraan usaha, selain saling menguntungkan, juga harus adil dan dinamis. Adil, dalam arti kemitraannya tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Sedangkan dinamis, dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa disesuaikan dengan tuntutan keadaan situasi dan kondisi setempat, sehingga efektivitas, produktivitas, dan kualitas usaha kemitraan senantiasa tetap terjaga. Sampai saat ini, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ternyata konsep kemitraan berusaha di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik, karena

itu diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat proses sosialisasi kemitraan berusaha. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini adalah membuat kebijakan, memfasilitasi pertemuan dan dialog antara perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta dengan petani sebagai pemilik lahan, tentang kemitraan berusaha.

***Kedelapan*, kebijakan anti monopoli, oligopoli dan kartel.** Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, tidak dibenarkan adanya praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi dan keadilan. Kegiatan monopoli sudah barang tentu tidak efisien, karena pelakunya secara sengaja membatasi keluaran dan membebankan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika keluaran atau produksi itu dihasilkan dalam kondisi persaingan yang murni dan sempurna. Oleh sebab itu dapat ditegaskan di sini bahwa monopoli atau sejenisnya seperti perusahaan-perusahaan BUMN adalah tidak efisien jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang murni bersaing, karena BUMN menghasilkan terlalu sedikit dengan beban biaya yang tinggi.

Berkurangnya persaingan atau kompetisi yang didukung oleh adanya subsidi Pemerintah, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dituduh sebagai perusahaan yang dijalankan dengan manajemen yang kurang baik, tidak

efisien dan dicemari oleh akses-akses birokrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Oleh karena itu usaha apaun, besar atau kecil termasuk perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan Daerah yang kegiatannya berbau monopoli, harus diswastakan (privatisasi) murni dan dipaksa untuk dapat bersaing di pasaran yang bebas. Demikian pula halnya dengan kegiatan kartel, tidak dibenarkan ada dan berkembang dalam sistem perekonomian kerakyatan.

Kegiatan kartel hanya menciptakan kelompok-kelompok usaha yang kecenderungannya dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja, sedangkan sebagian besar masyarakat yang lainnya tidak mendapatkan akses dan kesempatan untuk berusaha. Untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus lebih serius melaksanakan undang-undang tentang pelarangan kegiatan monopoli, oligopoli dan kartel dalam setiap dunia usaha.[]

BAB III

ADAPTASI SOSIAL PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pelaksanaan pembangunan selain meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus juga harus meningkatkan dan menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan azas keadilan sosial.

Sasaran pembangunan dalam arti yang luas tidak saja pencapaian produktivitas yang cukup tinggi melainkan juga secara bersamaan tercapai pula pemerataan hasil-hasil dan keseimbangan antara pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial budaya.

Pembangunan yang hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi telah menimbulkan kesenjangan sosial yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pola pikir masyarakat. Mereka yang

mempunyai kesempatan belajar telah mampu mencapai kemajuan dibidang ekonomi sedangkan yang berpendidikan rendah kecenderungannya tetap menjadi miskin kenyataan ini memberikan gambaran bahwa dalam proses pembangunan ada pembagian dari sistem masyarakat yang kurang berfungsi sehingga mengakibatkan tidak keseimbangan antara kemajuan-kemajuan dibidang sosial ekonomi dengan kemajuan sosial budaya. Persoalan yang timbul adalah masyarakat dihadapkan kepada dua pilihan memprioritaskan fungsi-fungsi lembaga sosial budaya termasuk pendidikan ataukah lebih dahulu memfungsikan lembaga ekonomi. Bagaimana pula proses adaptasi (penyesuaian) lembaga masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini akan dapat dipahami jika pikiran berpijak pada teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Herbert Spencer, Talcott Parsons dan Robert K. Marton.

1. Pendekatan Teori Struktural Fungsional

Menurut Herbert Spencer (dalam garna 1992 : 34) menganggap masyarakat pedesaan sebagai suatu organisme yang karena itu tumbuh dan berkembang keadaan seperti itu memperlihatkan evolusi struktural dalam masyarakat. Yaitu dari suatu yang berbentuk sederhana kebentuk yang kompleks atau dari yang homogen sifatnya ke heterogen. Perubahan yang

memperlihatkan diperensiasi sosial yaitu evolusi fungsi dan saling ketergantungan antara bagian-bagian dalam masyarakat.

Dari pandangan ini telah memberi ketegasan bahwa untuk mencapai keseimbangan pemerataan dan keadilan sosial pembangunan masyarakat pedesaaan harus memfungsikan semua lembaga (struktur atau sosial) dengan tidak memberi anggapan hanya lembaga misalnya lembaga ekonomi saja yang penting. Memfungsikan lembaga-lembaga yang lain juga adalah penting termasuk lembaga pendidikan politik, kebudayaan, agama, transportasi, informasi, dan lain sebagainya. Mengapa demikian karena menurut teori struktural fungsional masyarakat pedesaan sebagai suatu sistem yang memiliki struktur yang terdiri banyak lembaga dimana masing-masing lembaga mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-berbeda ada pada setiap masyarakat baik pada masyarakat pedesaan yang masih tertinggal misalnya lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru atau memberi pendidikan atau keterampilan pada anak, lembaga ekonomi memiliki fungsi mengatur proses produksi dan distribusi barang dan jasa masyarakat pedesaan termasuk lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat-tempat penampungan dan perkreditan bagi petani. Kesemua lembaga yang ada dalam masyarakat pedesaan

akan senantiasa saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan akan selalu melaksanakan penyesuaian (adaptasi), sehingga dimasyarakat akan senantiasa berada pada keseimbangan (orde). Memang, ketidakseimbangan akan muncul tetapi ini hanya bersifat sementara karena adanya ketidak seimbangan dalam satu lembaga sehingga fungsi lembaga tersebut terganggu akan mengganggu lembaga lain untuk menyeimbangkan kembali.

> Menurut lauer (dalam zamroni : 1992:92) juga berpandangan bahwa masyarakat pedesaan bersifat dinamis, dimana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Perubahan-perubahan masyarakat akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian. Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.

Teori struktural fungsional ini menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan masyarakat pedesaan perlu adanya proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya baik lingkungan alam, fisik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya, ini mempertegas kembali, bahwa proses perubahan masyarakat pedesaan harus disesuaikan dengan karakteristik yang dimilikinya. (perubahan menuruk kontekstual) ini dipertegas lagi oleh Garna (1992 : 65) yang menyatakan bahwa prasyaratan suatu sistem sosial diantaranya adaptasi dan kemampuan mempertahankan identitas mereka (*Laten Pattern Maintenance*).

Selanjutnya menurut Lauer (dalam Zamroni, 1992 : 93). Teori Struktural Fungsional menegaskan bahwa integritas yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan akan dinetralisir lewat proses perlembagaan, kemudian sistem diintegrasi lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan, dengan demikian tidak mungkin proses pembangaunan yang berlansung cepat, terutama dalam mengejar ketinggalan. Terutama dalam mengantisipasi kekuasaan atau gangguan dari pihak luar dapat saja terjadi pada masyarakat pedesaan.

Menurut Rusdi (1989 : 17) masyarakat desa merupakan masyarakat bagian atau masyarakat belahan dari masyarakat Nasioanal. Dengan demikian pengaruh struktural dan fungsi yang lebih besar tetap mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat pedesaan. Misalnya: masuknya perkebunan besar, perkebunan inti rakyat telah mempengaruhi fungsi ekonominya, demikian pula pengaruh kekuasaan fungsi lembaga-lembaga pemerintah melalui program-program pembangunan. Karena sumber-sumber terbatas, pembagian tidak merata maka menimbulkan disintegrasi.

Pada masyarakat desa, netralisasi lewat proses kelembagaan, adaptasi dan penyesuaian, dan sistem

integrasi lewat pemilihan nilai-nilai yang sama biasanya berjalan sangat lambat. Karena menurut Robert K. Marton (dalam Sufian, 1995 : 97) bahwa lembaga tertentu dapat fungsional bagi unit sosial tertentu dan sebaliknya. Disfungsional bagi unit sosial lainnya. Misalnya perkebunan yang besar (PIR) fungsional bagi mereka yang dapat kesempanan untuk ikut. Disinilah diperlukannya fungsi-fungsi lembaga lain, misalnya fungsi lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat desa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga memiliki daya kemampuan untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri atas perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian dalam proses perubahan (Pembangunan) yang lebih cepat diperlukan memfungsikan semua lembaga, baik lembaga ekonomi, lembaga pengembangan masyarakat (peningkatan sumber daya manusianya), lembaga politik supaya masyarakat mengerti akan hak dan tanggung jawabnya, dan lain sebagainya yang pada dasarnya semua lembaga adalah penting dan fungsional bagi sistem sosial (masyarakat).

2. Pendekatan Teori Konflik

Menurut Dahrendorf (dalam Garna, 1992 : 66) bahwa tidak mungkin memikirkan masyarakat, apabila tidak menyadari akan dialiktik stabilitas dan perubahan, integrasi dan konflik, fungsi dan daya motivasi, konsesus dan

paksaan. Lebih lanjut Dahrendorf (dalam Nasikun, 1984 : 49) menyebutkan bahwa Pendekatan konflik berpangkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut :

1. Sertiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat;
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat;
3. Setiap unsur yang ada di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain.

Teori konflik memandang masyarakat pedesaan senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya yaitu : melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi masyarakat, dan menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan

kekuasan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sosial teori ini apakah adanya wewenang dalam masyarakat tidak merata tampa kecuali masyarakat pedesaan secara sistematis perbedaan posisi serta perbedaan wewenag diantara wewenang yang ada dalam masyarakat itulah yang menjadi perhatian utama dalam penganalisaan pembangunan masyarakat pedesaan.

Menurut Ritzer (1985 : 41) bahwa tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran posisi kekuasaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa perubahan masyarakat sebagai akibat adanya unsur-unsur saling bertentangan di dalam sistem sosial. Kontradiksi tersebut bersumber dari kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian wewenang atau otoritas (authority) secara tidak merata, mengakibatkan sebahagian masyarakat memiliki otoritas, sebahagian yang lain tidak memilikinya. pembagian otoritas yang demikian mengakibatkan masyarakat yang menduduki posisi sebagai pemegang otoritas, memiliki kepentingan-kepentingan, baik secara substansial maupun arahnya, berlawanan satu sama lain.

> *Menurut Dahrendorf (dalam Sofian, 1995 : 102) bahwa Adanya mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik memimpin ke arah perubahan (pembangunan). Kalau konflik terjadi secara hebat dan luas maka perubahan sosial pun akan demikian pula.*

Selain memfungsikan struktur konflik dalam masyarakat juga diperlukan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan untuk mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Teori konflik juga dapat menjelaskan apa penyebab-penyebab terjadinya perubahan sosial dan dapat menjelaskan pengaruh karakteristik lingkungan di sekitar realitas sosial (masyarakat), dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang kontekstual.

3. Pendekatan Teori Modernisasi

Berbicara soal proses perubahan masyarakat pedesan yang lebih maju ditunjang oleh sikap dan perilaku masyarakat untuk menerima perubahan-perubahan, tidak lain adalah merupakan proses ke arah modern yang dinamakan modernisasi.

Menurut Kamil P. (1999 : 83) modernisasi diartikan sebagai suatu sikap pemikiran yang cenderung mendahulukan sesuatu yang baru sebagi suatu kebutuhan untuk lebih baik dari sebelumnya.

Dengan demikian modernisasi umumnya dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi untuk kemajuan masyarakat secara positif, begitu pula, masyarakat pedesaan yang ingin maju, senantiasa dapat terbuka menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada

dirinya. Dengan demikian ilmu pengatahuan dan teknologi dalam modernisasi memainkan peran yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan, sehingga manusia sebagai pelaku modernisasi dituntut untuk selalu siap menerima perubahan-perubahan tersebut.

Peristiwa modernisasi, awalnya terjadi di masyarakat Eropa, yang lazim disebut Revolusi Industri, perubahan-perubahan penggunaan alat-alat industri terjadi yang awalnya di Inggris dengan dilandasi semangat penerapan ilmu pengatahuan dan teknologi, dirumuskan tata cara baru produksi barang yang lebih efisein, akhirnya produktivitas meningkat. Ternyata sejalan dengan Revolusi Perancis sebagai awal demokrasi.

Perkembangan modernisasi selanjutnya tidak terbatas pada industrialisasi, demokratisasi, berlanjut pada bidang kehidupan lainnya, seperti pada bidang ilmu pengatahuan diikuti kemajuan teknologi.

Modernisasi masyarakat pedesaan jangan disalah artikan, karena bersikap modern bukan berarti meniru gaya kehidupan orang Eropa yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, masyarakat boleh saja berjiwa modern, yang terpenting dapat menerima perubahan yang positif dan dapat menolak pengaruh yang bersifat negatif, karena itu menurut M. Kamal Hasan (dalam Pradoyo, 1993 : 201)

dalam proses modernisasi menurut beberapa parasifasi, antara lain :

1. Melihat ke depan, bukan melihat ke belakang;
2. Memiliki sikap dinamis dan aktif, bukan menunggu.
3. Memberikan tempat bagi rasionalisasi, bukan perasan atau asumsi.
4. Mengembangkan suatu sikap terbuka terhadap pemikiran dan hasil penemuan ilmiah.
5. Memberikan prioritas kepada hal-hal yang telah dicapai seseorang, bukan kepada statusnya yang diakui.
6. Mengutamakan tujuan lebih besar (umum) dari tujuan pribadi atau golongan.
7. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada persoalan masyarakat.

Dalam tahap perkembangannya untuk mengkaji persoalan pembangunan masyarakat lebih tepat mengacu kepada teori modernisasi baru, karena memiliki kelebihan dibidang teori modernisasi klasik, sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Perbandingan Teori Modernisasi Klasik Dengan Teori Modernisasi Baru

No	Kategori	Teori Modrenisasi Klasik	Teori Modrenisasi Baru
	Persamaan :		
1	Keprihatinan	Negara dunia ketiga	Sama
2	Tingkat Analisa	Nasional	Sama
3	Variabel Pokok	Faktor internal : Nilai-nilai budaya, dan Pranata sosial	Sama
4	Konsep Pokok	Tradisional dan Modernisasi	Sama
5	Inplikasi kebijaksanaan	Modernisasi memberikan manfaat positif	
	Perbedaan :		
6	Tradisi	Sebagai penghalang pembangunan	Faktor positif pembangunan
7	Metode kajian	Abtrak dan kuntruksi trip	Studi kasus dan analis sejarah
8	Arah pembangunan	Garis lurus dan menggunakan U.S.A sebagai model	Berarah dan bermodel
9	Faktor ektern dan konflik	Tidak Memperhatikan	Lebih memperhatikan

Sumber : Suarsa dan Alvin (1991 : 60)

Dengan pendekatan teori modernisasi baru, pembangunan pedesaan ikut memperhitungkan teradisi masyarakat setempat sebagai faktor positif pembangunan, mengperhatikan pula faktor-faktor ekternal, konflik dan mengarah kepada beberapa model pembangunan pedesaan.

Ini lebih memperkuat argumentasi bahwa pembangunan pedesaan harus sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya (Kuntekstual). Dan pendekatan pembangunan pedesaan harus menggunakan beberapa model-model yang disesuikan dengan potensi dan karakteristiknya.

Perubahan sosial melalui pembangunan masyarakat pedesaan tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dimana masyarakat itu hidup dan berkembang. Ini dapat dipahami, bahwa dimana masyarakat itu tinggal tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh yang datangnya dari luar atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Diantaranya; pengaruh kondisi alam, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya yang merupakan karakteristik yang dimiliki masyarakat pedesaan, sebagaimana dikatakan Findley (dalam Saefullah, 1995 : 13) bahwa untuk memahami perilaku individu perlu mempertimbangkan setting kelompok dan lingkungan dimana individu itu berada. Setting tersebut meliputi

latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi, termasuk di dalamnya lingkungan fisik, sumber alam, sistem sosial, struktur ekonomi, tingkat pendidikan, kehidupan keagaman dan setuasi politik.

Dengan demikian pembangunan masyarakat yang berhasil tergantung pula pada bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan keadaan kelompok dan lingkungannya. Hal demikian dikatakan juga oleh Parsons dalam Garna, (1992 : 62 – 63) bahwa gerakan masyarakat dari primitif ke modern. Melalui pembaharuan yang bersifat penyesuaian (adaptive Upgrading) dan generelasasi nilai. Demikian pula yang dikatakan Cau cian (dalam Garna, 1992 : 65) yang menekankan perlunya unsur-unsur adaptasi dan integrasi dalam suatu sistem sosial , sistem sosial itu tidak runtuh. Kemudian menurut Garna (1992 : 10) bahwa titik mula dari perubahan sosial yang berlaku pada orang Baduy adalah adaptasi terhadap lingkungannya. Perubahan juga menambah kapasitas adaptasi, yang dari perjalanan hidup mereka telah memperoleh kontak dengan kehidupan dari luar dan intansi baru yang tumbuh sebagai hasil interaksi mereka. Adapun bagi kelompok masyarakat yang darjat toleransinya relatif rendah perlu terlebih dahulu menambah kehendak adaptasi.

Pada bidang politik dan demokrasi, selama orde baru masyarakat sudah berpola dengan sistem politik yang oteriter, hak-haknya untuk mengemukakan pendapat selalu

dibayangi rasa takut. Dengan demikian iklim demokrasi pada waktu orde baru memang kurang kondusif.setelah orde reformasi dimulai membaik, masyarakat perlu penyesuaian dengan kondisi yang baru. Masyarakat harus dapat menerima perbaikan-perbaikan melalui pendidikan politik dalam rangka proses demokrasi yang memberikan kesadaran kepada masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu harus tercipta suatu kondisi yang sedemikian rupa sehingga ada kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam pembangunan.

Dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dapat pula menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi yang baru. Sebagai akibat perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi, masyarakat jangan hanya mempertahankan tradisi sistem ekonomi subsistensi, melainkan mau toleransi menerima teknologi baru dengan mengambil manfaat teknologi tradisional sebagai patokan untuk pengembangan. Memang tidak mudah mengingat masyarakat yang sudah bertahun-tahun dengan teknologi mereka. Demikian pula dengan struktur ekonomi mereka yang dianggap sudah mapan. Namun demikian kemajuan-kemajuan dibidang sosila ekonomi masyarakat pedesaan tidak terlepas pula bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi baru sebagai pengalaman orang lain lewat penyebaran budaya . sebagaimana dikatakan

Krober (dalam Garna, 1992 : 74) bahwa proses penyebaran unsur-unsur budaya baru bagi masyarakat penerima adalah merujuk kepada pengembangan atau Growth dan tradisi sebagai suatu proses merujuk pada pemeliharaan.

Menurut Dove (dalam Suarsono dan Alvin, 1991 : 70) pembangunan harus melihat dan mengambil nilai i- nilai tradisional yang dianut masyarakat. Budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis dan oleh karena itu budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan. Banyak nilai lokal (budaya lokal) memberikan sumbangan pada proses pembangunan, misalnya ; tenaga berladang berpindah-pindah memberikan fungsi untuk menjaga kelastarian lingkungan untuk kelansungan hidup masyarakat, demikian pula bagaimana semangat wiraswata yang dimiliki eknis Cina dan ramuan obtan tradisionalnya memberikan sumbangan bagi modernisasi. Contoh lainnya dalah sistem pengairan yang dikembangkan di Bali, suatu budaya yang juga bermanfaat untuk teknologi pengairan. Kesemua itu memperkuat argumantasi bahwa dalam proses pembangunan nilai-nilai sosial budaya dapat memberikan nilai positif, dan oleh karena itu nilai-nilai yang baru memerlukan proses adaptasi dengan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Demikian pulah halnya dengan nilai agama yang dianut masyarakat, telah banyak memberikan sumbangan proses perubahan masyarakat, misalnya bagimana ajaran Calvin

tentang etika protestan dan agama Tokugawa Jepang, telah memberikan semangat tumbuhnya, perekonomian penganutnya.

Selain dari yang telah dijelaskan, ternyata karateria sumber alam dan kondisi wilayah turut pula menentukan keberhasilan suatu pembangunan masyarakat pedesaan. Bebarapa kasus menunjukkan kurang mendapat nilai ekonomis apabila kegiatan ekonomi penduduk yang kurang sesuai dengan kondisi alam. Misalnya jenis tanaman (usaha) yang tidak sesuai dengan sumber-sumber setempat, baik tingkat kesuburan lahan maupun potensi alam. Demikian pula perlu penyesuaian jenis produk yang dihasilkan petani dengan bahan baku yang menjadi kebutuhan pabrik-pabrik pengelohan (perusahaan menufaktur). Dan menganalisis kebutuhan pasar, artinya produk pertanian yang sangat dibutuhkan pasar lokal, domestik, dan Internasional.

Selanjutnya masyarakat pedesaan berhasil sangat tergantung pula kepada bagaimana masyarakat pedesaan dapat beradaptasi dengan karateristik yang dimilikinya, antara lain : sistem politik, sosial ekonomi, sosial budaya, nilai agama, potensi alam, keadaan wilayah, termasuk setuasi pasar. Karena dinamika masyarakat tidak dapat melepaskan dari pengaruh internal dan ekternal, baik faktor-faktor alam maupun faktor sosial.[]

BAB IV

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEDESAAN

Kalau direnungkan, pembangunan masyarakat pedesaan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu : masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangunan. Dan masalah meteri yang mau dihasilkan dan dibagi-bagikan.

Para ahli ekonomi hanya menekankan pada aspek keterampilan, dan manusia lebih dianggap sebagai faktor produksi saja. Yang kurang dipersoakan adalah bagaimana menciptakan sistem sosial, yang bisa mendorong lahirnya manusia kreatif. Dengan demikian, pembangunan tidak saja berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material selain itu, pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang memuat manusia yang bisa tumbuh dan mengembangkan kreatifitas. Jadi pembangunan harus dimulai dari pembangunan manusianya.

Pengembangan sumber daya manusia, tidak terlepas dari pada untuk membuat sebuah pekerjaan menjadi berhasil. Yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Perseoalannya apakah seseorang memiliki semangat baru yang sempurna dalam menghadapi pekerjaan. Dan apakah dia memiliki keinginan untuk berhasil. Sejalan yang dikemukakan. Mc Clelland (dalam Budiman, 1995 : 23) dengan konsepnya *The need for Achievement (n-Ach)* yaitu kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Orang dengan n-Ach yang tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena mendapat imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerjanya dianggap sangat baik.

Mengacu pada konsep tadi, maka kemampuan sumber daya manusia di pedesaan yang di tingkatkan terlebih dahulu, karena kalau dalam masyarakat ada banyak orang yang memiliki n-Ach yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya kemajuan suatu masyarakat itu sendiri maju atau berkeinginan untuk terus berprestasi.

Memajukan masyarakat dapat dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, diskusi-diskusi, bahan-bahan bacaan, kursus-kursus keterampilan, pemanfaatan media informasi yang kesemuanya dapat memberi semangat dan motivasi berprestasi tinggi.

Menurut Inkeles dan Smith (dalam Kamil P,1999 : 89) bahwa pembangunan negara berkembang memerlukan manusia-manusia modern yang siap menerima perubahan.

Menjadi manusia modern yang perlu dirubah adalah watak masyarakat. Tentang proses perubahan manusia modern, Inkelas dan Smith (dalam Budiman, 1995 : 35) mengatakan bagaimanpun juga, manusia bisa dirubah secara mendasar setelah dia menjadi dewasa, dan karena itu tak ada manusia yang tetap menjadi manusia tradisional dalam pandangan dan keperibadiannya, hanya karena dia dibesarkan dalam sebuah masyarakat tradisional.

Inkelas dan Smith memberikan pemahaman bahwa dengan memberikan lingkungan yang tepat, setiap orang bisa diubah menjadi manusia modern, setelah dia mencapai usia dewasa.

Bagaimana menjadikan masyarakat pedesaan menjadi orang modern. Menurut Inkelas dan Smith (dalam Suarsono dan Alvin,1991 : 33) ada beberapa faktor antara lain : pendidikan, penduduk desa mencari pengalaman ke kota, tersedianya media informasi (televisi, radio, surat kabar, majalah, jurnal iptek), memberikan pendidikan politik, modernisasi pabrik dan administrasi industri, dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Selanjutnya kondisi-kondisi apa yang membuat suatu masyarakat dapat membimbing proses mengatur kehidupan

dan membentuk kembali. Menurut Etzioni (dalam Garna, 1992 : 77) mengatakan bahwa pengatahuan, pengambilan keputusan, kekuasaan, kesesuaian paham dan mobilisasi sebagai variabel-variabel penyambung pada transformasi dari masyarakat yang terasing kepada tahap masyarakat aktif.

Etzioni yakin bahwa pengatahuan ilmiah, termasuk ilmu-ilmu pengatahuan sosial, akan dipakai dalam transformasi sosial, khususnya dalam memahami dan mewujutkan masyarakat yang self-guinding. Masyarakat lebih menjadi demokratis, penggunaan jasa paksaan dikurangi dan kontrol sosial pun lebih efektif.

Banyak ahli ekonomi berangkali sependapat bahwa bukanlah sumber daya modal atau materi yang sepenuhnya menentukan karakterisasi dan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial, melainkan sumber daya manusia. Sebagimana dikatakan Herbison (dalam Todaro 1995 : 385) bahwa sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan negara. Sumber daya alam dan modal merupakan faktor-faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengelola sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional lebih lanjut.

Dengan demikian investasi sumber daya manusia akan menghasilkan manfaat ganda. Sedangkan mekanisme

kelembagaan yang paling penting bagi pengembangan keterampilan masyarakatlah sistem pendidikan nonformal. Peningkatan kesempatan pendidikan kuantitatif dan kualitatif yang cepat akan merupakan kunci pokok pembangunan masyarakat pedesaan.

Permasalahanyangsangatmendasartentangpendidikan di pedesaan adalah kurang sesuainya sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Ini disebabkan, sistem pendidikan hafalan, pengulangan dan pengalaman, bukannya pemikiran, penalaran atau pemecahan masalah. Jadi sekolah-sekolah dasar amat terbatas waktunya untuk memberikan bekal pengatahuan kecakapan dan gagasan-gagasan baru yang sangat dibutuhkan murid agar bisa berfungsi secara efisien di dalam lingkungan pedesaan, misalnya praktek pertanian dan pengelolaannya, kesehatan, nutrisi, pembangunan komunikasi dan sebagainya. Yang menjadi prioritas hanya membaca, menulis, berhitung dan bahasa asing, sesungguhnya kebanyakan mereka bukan dipersiapkan untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Misalnya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dengan tarap kehidupan keluarga yang rendah, sering gagal dalam menyelesaikan pendidikan.

Menurut Simmon (dalam Yodaro; 1995 : 397) menyebutkan ada empat faktor paling penting yang merupakan determinasi terhadap kemampuan belajar anak-anak, yaitu :

1. Lingkungan keluarga, termasuk tingkat penghasilan, pendidikan orang tua, kondisi perumahan, jumlah anak dalam suatu keluarga, dan sebagainya.
2. Interaksi kelompok sebaya, yaitu tipe anak-anak dengan siapa seseorang anak berhubungan.
3. Keperibadian, yaitu inteligensia dan kecapan yang diturunkan kepada anak.
4. Nutrisi dan kesehatan selama bertahun-tahun awal.

Setidaknya ada beberapa manfaat dari investasi sumber daya manusia di pedesaan, antara lain : mendorong pertumbuhan ekonomi, terciptanya angkatan kerja terdidik, memacu sikap-sikap modern masyarakat, dan mengurangi tingkat kesuburan wanita.

Menurut Todaro (1995 : 423) banyak pendidikan di masyarakat desa di negara-negara berkembang hanya sedikit sumbangannya di dalam memperbaiki tingkat produktivitas pertanian alam atau di dalam membuat murid bisa belajar lebih efektif di lingkunagan masyarakatnya.

Selanjutnya Coombs (dalam Todaro, 1995 : 423) mengelompokkan pada empat kelompok pendidikan yang diperlukan penduduk usia muda dan dewasa, laki-laki dan perumpuan, dalam empat bagian sebagai berikut:

1. Pendidikan umum atau pendidikan dasar, membaca, menulis, berhitung, lingkungan hidup dan sebagainya.

2. Pendidikan kesejahteran keluarga, untuk mendalami pengatahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga termasuk kesehatan, nutrisi, rumah sakit, perawatan anak, membangunan rumah dan memperbaikinya, keluarga berancana, dan sebagainya.
3. Pendidikan kesejahteraan masyarakat, dirancang untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik lokal maupun nasional, LMD, LKMD, koprasi, proyek kemasyarakatan dan upaya serupa.
4. Pendidikan keterampilan kerja, dirancang untuk mengembangkan pengatahuan dan kecapan khususnya yang berkaitan dengan efektivitas ekonomi dan yang bermanfaat bagi usaha membina kehidupan.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan peningkata SDM, berikut ini akan ditunjukkan betapa kebutuhan terhadap pendidikan berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain di lingkungan pedesaan. Program-program pendidikan yang efektif dan diatur dengan baik secara cocok untuk semua kelompok pekerja adalah sangat diperlukan jika pendidikan dimaksudkan sebagai sarana penunjang yang penting bagi pembangunan pedesaan. Untuk lebih jelasnya tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Ilustrasi Mengenai Kelompok-kelompok Pekerja dan Kebutuhan Pembelajarannya

Kelompok-kelompok Pekerja	Jenis-jenis kebutuhan pembelajaran (pada berbagai tingkat kecanggihan dan spesialisasi tertentu)
A. Orang-orang yang terlibat lansung dalam pertanian 1. Petani komersial 2. Keluarga petani subsisten dan semi subsisten 3. Buruh tani	Perancanaan dan manajemen tanah, pengambilan keputusan yang rasional, pencatatan, perputaran biaya dan pendapatan, penggunaan kredit Aplikasi masukan-masukan baru, varietas bibit, praktek-pratek pengelolaan lahan pertanian yang lebih baik Penyimpangan, pemrosesan dan cadangan pangan Keterampilan tambahan mengenai pemeliharaan dan peningkatan lahan, pekerjaan sambilan untuk penghasilan tambahan pengatahuan tentang pelayanan pemerintah,kebijakan-kebijakan,program-perogram dan target-target pemerintah Pengatahuan dan keterampilan mengenai kesejahteran keluarga (seperti kesehatan, nutrisi, ekonomi rumah tangga, perawatan anak,
B. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas di luar bidang 1. Pengecer dan pedagang besar sarana produksi pertanian, barang-barang untuk konsumsi dan barang-barang lainnya. 2. Pembayaran jasa-jasa reparasi dan pemeriharaan 3. Penglolahan, penyiapan dan pengiriman barang komoditas pertanian 4. Penyaluran jasa perbankan dan perkreditan 5. Tukang bangunan dan tukang lainnya 6. Penyaluran suku cadang jasa transportasi 7. Manufaktur kecil	Pengatahuan teknis yang dapat diterapkan di bidang pengadaan dan jasa-jasa Pengendalian mutu Pengatahuan teknis yang mencukupi tentang barang-barang yang dikelola agar dapat memberikan penjelasan kepada pelanggan cara-cara bagaimana menggunakannya, memeliharanya, dan sebagainya. Keterampilan manajemen (perancanaan usaha, pembuatan catatan dan penghitungan biaya, perbekalan, analisis pasar adan metode penjualan,hubungan dengan pelanggan dan karyawan,pengatahuan mengenai jasa-jasa pemerintah, peraturan-peraturan, perpajakan, perkreditan)
C. Orang-orang yang bergerang di bidang jasa umum : **Administrator desa, perancanaan dan para ahli teknisi** 1. Administrator pemerintah, perancanaan dan analisa diberbagai bidang 2. Manajer, perancanan, teknisi dan para pembimbingdi bidang jasa pemerintah tertentu (misalnya pertanian, tarnsportasi, irigasi, kesehatan, industri kecil, pendidikan, jasa keluarga,pemerintah dan sebagainya) 3. Manajer koprasi dan petani lainya 4. Manajer dan personel jasa perkreditan lainya	Keterampilan di bidang administrasi, perancanaan, pelaksanaannya,arus informasi aktivitas promosi Ketampilan teknis dan manajemen mengenai spesialisasi tertentu Kepimpinan dalam menggerakkan komunitas dan kegiatan kolektif, kerja sama staf dukungan dari esolan yang lebih tinggi

Sumber. Coombs (dalam Todaro, 1995 : 425)

Kemudian Coombs dan Ahmed (1985 : 37 – 39) mengemukankan dari empat pendekatan untuk meningkatkan sumber daya manusia pedesaan, diantaranya:

1. Pendekatan penyuluhan, berusaha merubah pertanian subsistensi menjadi suatu masyarakat yang dinamik, dan meningkatkan suatu taraf hidup keluarga dan masyarakat.
2. Pendekatan pelatihan/pendidikan, pengajaran yang sistematis serta mendalam untuk meningkatkan keterampilan dan pengatahuan dasar tertentu.
3. Pendekatan swadaya terpadu, merubah watak, sikap penduduk terhadap pembaharuan dan hasrat mereka akan perbaikan nasib.
4. Pendekatan pembangunan terpadu, sifatnya beraneka ragam dan tegas dalam memilih metode pendidikannya. Suatu pandangan yang luas mengenai proses pembangunan dan cara mengkoordinasi dalam rangka satu sistem pengelolaan tunggal segala komponen penting.

Dengan demikian jelaslah bahwa secara konvensional pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi ''*human capital*'' yang harus dilakukan sejalan dengan investasi physikal capital.

Cakupan pembangunan sumber daya ini meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas,

dan pengembangan enterpreneurial, yang kesemuanya bermuara kepada peningkatan produktivitas manusia. Karenanya dikatatan kenerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indikator pendidikan, pelatihan, kesehatan, gizi, dan sebagainya yang disebut di atas tadi.

Namun, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada hanya untuk membuat manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan interpretasi pengembangan sumber daya manusia lebih luas lagi, seperti yang dikemukakan Tjokrowinato (1996 : 29) bahwa pembangan sumber daya manusia menjangkau demensi yang lebih luas yang menekankan pentingnya kemanpuan manusia untuk ikut berpertipasi dalam proses transformasi masyarakatnya dimana mereka hidup bukan suatu struktur yang statis, tertutup, suatu realita yang harus diterima saja, tetapi menuntut mereka untuk beradaptasi sepenuhnya kepada sistem.

Pembangunan sumber daya manusia masyarakat pedesaan tidak sekitar pendidikan, kesehatan dan gizi, akan tetapi membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural dan sebagainya dari sistem sosial yang ada, dan mencari alternatif-alternatif pemecahan. Jadi menyangkut pula membentuk mental yang baik, sikap kritis dan pola

pikir berlian, selalu ingin maju dan berperestasi, tumbuh jiwa wiraswasta, punya ide-ide cemerlang, pandangan kedepan menyongsong hari esok dan mampu sebagai agen pembangunan. Apabila sudah memiliki tingkat sumber daya yang demikian, diharapkan pula dapat mengembangkan ilmu pengatahuan dan teknologi, termasuk menggali dan mengembangkan teknologi pribumi *(eudugeulous technology)* yang dimilikinya. Dengan memberikan peningkatan kepada kemampuan sosial ekonominya.

Menurut Hagen (dalam Tjokrowinoto, 1996 : 49) bahwa diterimanya keberhasilan pembangunan suatu negara tergantung pada peran faktor makro individu, yaitu keperibadian. Ada empat unsur keperibadian sumber daya manusia, yaitu : intelegensia dan energi, orientasi nilai, kognisi dan kebutuhan *(need),* yang membedakan keperibadian antara bangsa-bangsa adalah pada unsur kebutuhan *(need).* Keberhasilan pembangunan menurut peribadi yang mempunyai kebutuhan manipulatif (mengubah lingkungan) yang tinggi, kebutuhan agresif (bertindak agresif), rendah, dan kebutuhan pasif (bersikaf pasif) yang rendah, kebutuhan manipulatif terdiri atas empat unsur, yaitu : need achievement (kebutuhan untuk selalu berperstasi), need outonomy (kebutuhan mandiri), need order (kebutuhan untuk hidup dalam lingkungan yang serba teratur), dan need understanding (kebutuhan untuk selalu memahami peristiwa yang terjadi), yang masing-masing juga harus tinggi.

Untuk merubah sumber daya manusia masyarakat pedesaan sehingga memiliki kualitas keperibadian yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan pada bidang lain perlu upaya-upaya yang sungguh-sungguh. Dengan demikian akan terbentuk manusia-manusia sebagaimana yang dikatakan Dahlan (1992 : 9 -10) bahwa kualitas manusia Indonesia seutuhnya adalah memiliki kualitas fisik, yaitu : kesegaran jasmani, kesehatan, daya tahan fisik, dan sebagainya. Dan kualitas non fisik yaitu :

1. Kualitas keperibadian : Kecerdasan, kemendirian, kreativitas, ketahanan mental, keseimbangan antara emosi dan rasio;
2. Kualitas masyarakat : keselarasan hubungan sesama manusia;
3. Kualitas berbangsa : tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara;
4. Kualitas spiritual : religiousitas dan moralitas;
5. Wawasan lingkungan : kualitas yang diperlukan untuk mewujutkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
6. kualitas kekaryaan : kemampuan mewujutkan aspirasi dan potensi diri dalam bentuk kerja nyata guna menghasilkan sesuatu dengan mutu yang sebaik-baiknya.

Bagaimana pula strategi *pembangunan* kepribadian pembangunan sumber daya manusia masyarakat pedesaan. menurut Tjokrowinoto (1996 : 53) bahwa peribadi manusia terbentuk melalui *nature* (unsur genetika/biologis) dan *masture* (unsur pola asuh).

Selanjutnya menurut Pikunas (dalam Tjokrowinoto, 1996 : 54) bahwa paradigma perkembangan keperibadian dapat dinyatakan dalam persamaan (equation) sebagai berikut :

CR = f (Sg, e,T)

Secara rinci dapat dikatakan bahwa perkembangan keperibadian (D), adalah fungsi (f), genetika (g), dan stimulasi (S), lingkungan (e), yang terjadi pada kurun waktu tertentu (T), dan akan menghasilkan perubahan (C), pada organisme (Q), dan perilaku (B). dan kita asumsikan atribut psikologis perkembangan peribadian akan terfleksi sebagai respon (R) dari orgaisme.

Di dalam konteks kearifan pembangunan yang mendasarkan daripada "*Human centered develoment*" justru kearifan, inovasi, dan daya kreasi manusia yang mempunyai potensi untuk tumbuh secara *ezponential*, merupakan "*Inexhaustible determinant*" proses pembangunan itu sendiri. Karenanya "*Human centered develoment*" merupakan "*Conditio – sine qao non*" dari pembangunan yang berkelanjutan (*subtained development*).[]

Telah Berpulang Kerahmatullah
Pembina Kami, Orang Tua Kami, Bapak Kami

DR. H. INDRA MUKHLIS ADNAN

Meninggal dunia,
Jum'at, 26 April 2024
Pukul 16.51 Di RS Arifin Ahmad PKU

Mari Kita Doakan
Semoga amal ibadah beliau diterima, diampuni segala dosa selama hidupnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
Amin

BAB V

PEMBANGUNAN EKONOMI DI PEDESAAN

Perubahan masyarakat pedesaan tidak dapat hanya dilihat dari sisi *“Human centered develoment”* sebagimana telah disinggung pada uraian sebelumnya. Karena harapan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia adalah supaya pembangunan terarah juga pada “ *Production centered development* ”.

Adam Smith, sebagi tokoh sentral Aliran Ekonomi klasik telah mengemukakan ajaran “ *individualisme* ” dan “ *Laissez Faire* ” adalah semboyan yang lahir dari semangat *individualisme*. Menurut Smith (dalam Tjokroamidjojo, 1995: 30) bahwa sistem *induvidualisme* ekonomi menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah tidak perlu campur tangan. Tiap-tiap produser dan konsumen merdeka bertindak, pembentukan

karya didasari kepada hukum permintaan dan permintaan pasar, menjadi dasar pengambilan keputusan. Harga yang terbentuk atas dasar mekanisme pasar tersebut, dengan sendirinya akan mengpengaruhi produksi, alokasi, pendapatan dan konsumen. Dan semua itu akan lancar jalannya apabila orang seseorang merdeka bertindak dan berbuat. Mekanisme pembentukan harga akan membawa segala hubungan ekonomi secara otomatis kejurusan persesuaian kepada keadaan seimbang. Dengan *"invisibel hand"* mekanisme harga tersebut "*natural orde*" dan *naturan price*, akan berlaku.

Pendekatan teori klasik ini akan baik hasilnya, jika persyaratan-persyaratan yang memungkinkan setiap individu memiliki kemampuan yang sama untuk berperan dalam iklim *individualisme*. Pendekatan pembangunan ekonomi ini tidak akan baik, kalau iklim usaha tidak kondusif. Misalnya masih ada monopoli, oligopali, kartel, dan harus ada perangkat aturan yang jelas. Mereka yang sudah memiliki kesempatan yang besar untuk menguasai sumber-sumber ekonomi. Akibatnya terjadi kepincangan sosial, dimana yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah melarat, inilah mungkin yang terjadi di pedesaan dengan kebijakan perkebunan dalam skala luas.

Menurut Smith dan Mill (dalam Tjokroamidjojo, 1996: 32) bahwa penduduk secara pasti merupakan tenaga produksi yang akan melahirkan perluasan pasar dan

pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi perlu pula memperhitungkan faktor non-ekonomi : kepercayaan masyarakat, kebiasaan-kebiasaan berpikir, adat istiadat, dan corak kelembagaan dalam masyarakat. Ini memperkuat argumen bahwa pembangunan ekonomi perlu memeperhatikan kontekstual desa.

Kemudian Keynes (dalam Tjokroamidjojo, 1995: 34) mengatakan bahwa rendahnya suatu pertumbuhan ekonomi sebagai akibat kurangnya penanaman modal dari pengusaha-pengusaha, maka pemerintah harus bertindak berupa kebijakan fiskal dan moneter. Untuk melengkapi pendapat ini, Domar menambahkan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, sekaligus juga sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam sewaktu waktu tertentu digunakan dua tujuan: mengganti alat-alat modal yang tidak dapat dipergunakan dan untuk memperbanyak jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Yang menghanghasilkan dua macam nilai, yaitu rasio produksi modal dan rasio modal produksi (*capital output ratio*).

Teori ini menuntun kebijakan ekonomi masyarakat, bahwa perlunya investasi dan modal kerja. Untuk itu perlu didukung oleh pemerintah, terutama mencari investor

dalam dan luar negeri, serta pengadaan kredit usaha yang disediakan pihak bank. Selain itu diperlukan pula lembaga ekonomi yang lain, misalnya koperasi masyarakat pedesaan untuk usaha simpan pinjam, memberi semangat budaya menabung, dan termasuk persediaan saprodi untuk keperluan petani, serta destribusi pemasaran hasil-hasil pertanian. Tampa itu semua pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat sulit dicapai.

Aliran Neo klasik yang dipelajari Cobb dan Douglas (dalam Tjokroamidjojo, 1995 : 36) bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat ditentukan oleh pertumbuhan dalam penawaran faktor-faktor produksi. (alat-alat modal di tenaga kerja) dan teknologi. Fungsi produksi yang telah berkembang, yang terkenal dengan istilah "Cobb-Douglas *Production Function*, sebagai berikut :

Yt = Tingkat Produksi Pada Tahun t;

Tt = Tingkat Teknologi Pada tahun t;

Kt = Jumlak Stok Alat-Alat Modal Pada Tahun t;

Lt = Jumlah Tenaga Kerja Pada Tahun t

x = Pertambahan Produksi Akibat pertumbuhan Satu Unit Modal

B = Pertumbuhan Produksi Akibat pertambahan Satu Unit Tenaga Kerja

Nilai x dan B biasanya ditentukan dengan anggapan bahwa x + B = 1, berakti nilai x dan B adalah sama dengan

nilai produktivitas batas dari masing-masing faktor tersebut, dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam pencapaian pendapatan masyarakat.

Dalam menganalisa tahapan pembangunan sosial ekonomi pedesaan, dapat mengacu pada konsep proses pembangunan yang dikemukan Rostow (dalam Budiman, 1995 : 25 – 31) bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terkebelakang ke masyarakat yang maju, yaitu :

1. Masyarakat tradisional : tingkat ilmu pengatahuan masyarakat rendah, masyarakatnya masih dikuasai kepercayaan kekuatan magis, tunduk kepada alam, produksi terbatas, ekonomi subsistensi, tidak ada investasi, dan masyarakatnya statis.
2. Prakondisi untuk lepas landas : masyarakat tradisional meskipun sangat lemah, terus bergerak mencapai suatu titik prakondisi untuk lepas landas. Perubahan ini karena ada campur tangan dari luar, mulai dari ide pembaharuan. Usaha untuk meningkatkan tabungan terjadi digunakan untuk investasi sektor-sektor produktif dan menguntungkan, termasuk pendidikan.
3. Lepas landas : dimulai dari tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi yang aktif meningkat 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional

industri-industri baru mulai berkembang dengan pesat. Pertanian menjadi usaha komersial, bukan sekedar untuk konsumsi.

4. Bergerak ke kedewasaan : terjadi proses kemajuan yang terus bergerak kedepan, tabungan dan investasi mencapai antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional dan diinvestasikan kemabali. Industri berkembanmg sangat pesat, sebahagian barang diimpor sekarang sudah di produksi dan ekspor barang-barang baru mengimbangi impor. Setelah 40 – 60 tahun setelah periode lepas landas terakhir, tingkat kedewasan biasanya tercapai.
5. Jaman konsumsi masal yang tinggi : karena pendapatan masyarakat naik , konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri berubah kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan utama, surplus ekonomi akibat proses politik dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pembangunan sudah berkesinambungan untuk kemajuan terus menerus.

Teori Rostow tentang lima tahap pertumbuhan ekonomi ini, seperti teori modernisasi lainnya, didasarkan

pada dekotomi masyarakat-masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik tengah dalam gerakan kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah periode lepas landas (masyarakat transisi). Kalau mengaku ke pedesaan, tingkat perkembanganya yaitu desa tradisional, desa tradisional dan desa modern, dalam perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat Rostow juga mengemukakan penting adanya kelompok wiraswastawan, elite baru dalam masyarakat, misalnya : kaum pedagang, meningkatnya investasi, tumbuh industri pengelolaan (manufaktur) dan adanya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang dapat menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif.

Pada umunya pedesaan di Indonesia karena sebagai negara agraris, sektor pertanian yang menjadi andalan. Menurut Weitz (dalam Todaro, 1995 : 367) terdapat tiga langkah atau tahapan besar di dalam perjalanan evolusi produksi pertanian : pertama, pertanian subsisten yang produktivitasnya rendah; kedua tahapan pertanian diversifikasi atau capuran; ketiga, tahapan pertanian modern, produktivitas yang tinggi untuk mengisi pasar-pasar komersial.

Modernisasi di bidang pertanian di dalam ekonomi pasar campuran seperti yang tampak di pedesaan akan mengalami peralihan secara bertahap, dari subsisten (untuk memenuhi kebutuhan sendiri) menuju spesialisasi produksi

(komersial). Akan tetapi transisi tersebut lebih banyak memerlukan adanya reorganisasi struktural ekonomi pertanian atau aplikasi teknologi pertanian.

Kebanyakan masyarakat pedesaan pada saat ini, pertanian bukan saja aktivitas ekonomi, tatapi sudah menjadi cara hidup. Setiap pemerintah yang berusaha untuk mengubah pertanian tradisionalnya ini harus mengatahui bahwa selain penerapan struktural pertanian yang baru, perubahan-perubahan yang berpengaruh kepada seluruh struktur kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan kelembagaan pada masyarakat, kesemuanya itu sangat diperlukan. Tampa adanya perubahan seperti itu, pembangunan masyarakat pedesaan tidak akan beranjak atau barangkali hanya akan memperlebar kesenjangan antara sekelompok kecil orang yang kaya dan makmur dan mayoritas petani miskin.

Di dalam pertanian subsisten tradisional, keluaran dan konsumsi identik dengan dua tiga hasil pertanian pokok (biasanya sagu, beras dan jagung) merupakan sumber pangan utama. Keluaran dan produktivitasnya rendah dan peralatan pertanian yang digunakan amat sederhana, lingkungan statis, musim tanam sangat tergantung pada cuaca, dan tenaga kerja merupakan faktor produksi pokok. Gagal panen dan kurang keterampilan dalam mengelola lahan merupakan bencana bagi kelansungan hidup petani. Para petani memperkerjakan anggota keluarganya.

Terbatasnya teknologi, kakunya lembaga-lembaga sosial dan terbagi-baginya pasar merintangi meningkatnya produksi. Sebagian besar masyarakat pertanian pedesaan masih tetap berarti pada tahap subsistensi. Namun kebanyakan pertanian tradisional dapat berprilaku secara ekonomi rasional, jika dihadapkan kepada alternatif kesempatan.

Menurut teori yang baku, pendapatan rasional atau laba (profit) maksimum pertanian atau perusahaan akan selalu memilih metode produksi yang akan meningkat keluaran pada biaya tertentu atau menurut biaya pada tingkat keluaran tertentu (prinsip ekonomi). Oleh karena itu, jika rasio dan ketidak pastiannya pasar, seorang petani miskin akan segan (pikir-pikir dulu) untuk beralih dari teknologi tradisional dan bertani yang telah bertahun-tahun mereka tekuni ke teknologi baru, yang walupun menjanjikan hasil panen lebih tinggi, namun mengandung resiko kegagalan yang besar juga. Menurut Todaro (1995 : 370) mengatakan bahwa ada beberapa faktor mengapa petani kecil kurang responsif terhadap peluang ekonomi yang jelas, diantaranya karena : pemerintah memberikan jaminan harga yang tidak pernah dibayar, memasukan pelengkap (pupuk, obat-obatan, anti hama, pengairan, kredit-kredit yang tidak bisa dimanfaatkan dan sebagainya), semuanya itu di tidak tertenggulangi petani kecil.

Dengan demikian usaha-usaha untuk memperkecil resiko dan melenyapkan hambatan-hambatan komersial

dan kelembagaan terhadap inovasi baru termasuk teknologi, merupakan persyaratan pokok (esensial) bagi pembangunan pertanian di pedesaan.

Selanjutnya diversifikasi tanaman atau pertanian campuran merupakan langkah pertama yang dapat dianggap masuk akal untuk beralih dari subsisten ke spesialisasi produksi. Dalam tahap ini panen pokok tidak lagi di dominasi keluaran pertanian, karena hasil bumi baru untuk perdagangan seperti buah-buahan, sayuran, kopi, the, sawit, kelapa, nenas, pisang, jeruk, mangga, rambutan dan sebagainya dapat dipungut bersama-sama dengan hasil kolam dan ternak peliharaan.

Aktivitas baru ini dapat dilakukan lebih santai, dimana banyak tenaga kerja petani diluar masa panen dalam keadan setengah menganggur, memanfaatkan sisa lahan. Akhirnya dengan menggunakan traktor kecil, mesin penyebar benih, bajak-bajak yang dijalankan hewan, penggunaan bibit unggul, pupuk, irigasi, racun hama, dan irigasi akan meningkatkan hasil panen pokok seperti, beras, dan jagung serta dapat menghemat tanah untuk digunakan menahan tanaman perdagangan, tampa menggangu sediaan panen pokok. Para penggarap lahan yang demikian dapat memiliki surplus panen yang dapat dijual ke pasar yang hasilnya dapat meningkatkan standar hidup keluarganya atau digunakan untuk investasi, divertifikasi tanaman dapat juga memperkecil pengaruh gagalnya panen, disamping

memberikan jaminan tambahan pendapatan. Sukses atau gagaglnya petani di pedesaan, akan tergantung tidak hanya pada kemampuan petani dan keterampilannya dalam meningkatkan produktivitasnya, tertapi bahkan yang lebih penting tertumpu pada kondisi-kondisi sosial, komersial dan kelembagaan yang melingkupi petani. Khususnya jika petani telah yakin gampang memperoleh kredit ,pupuk, air, penjelasan-penjelasan dari penyuluh, fasilitas pemasaran, dan sebagainya, dan jika petani tidak ragu-ragu lagi akan dapat memperoleh keuntungan dari setiap perbaikan, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa petani tidak tanggap terhadap rangsangan ekonomi dan peluang-peluang baru untuk memperbaiki taraf kehidupan kehidupan masyarakat di pedesaan.

Kemudian dari pada itu, spesialisasi tanaman merupakan tahap akhir dan paling maju dari lahan pertanian yang dikelola secara individu dari dalam perekonomian pasar campuran. Pada tipe pertanian yang mengenal spesialisasi tanaman atau usaha, penyediaan pangan bagi keluarga dari surplus atau kelebihan penjualan pasar tidak lagi merupakan sasaran motivasi pokok. Keuntungan yang benar-benar komersial menjadi ukuran atau kriteria sukses usaha manusia atas lahan pertanian per meter kubik (Irigasi, pupuk, anti hama, bibit unggul dan sebagainya, sementara itu tujuan aktivitas usaha. Produksi dimaksudkan semata-mata untuk pasar dan konsep-konsep

ekonomi, seperti biaya tetap, biaya variabel, tabungan, investasi dan tingkat laba atau keuntungan, kombinasi-kombinasi faktor optimal, harga-harga pasar dan penunjang harga dan sebagainya, mempunyai peranan kuantatif dan kualitatif. Pembentukan modal, kemajuan teknologi, penelitian ilmiah, memainkan peran besar di dalam meningkatkan keluaran dan produktivitas yang lebih tinggi. Spesialisasi tanaman mungkin berbeda ukuran, bentuk dan fungsinya. Cakupannya meliputi pembudidayaan buah-buahan, sayur-sayuran, perkebunan, peternakan dan perikanan yang sangat luas padat modal. Dalam banyak hal peralatan mekanis yang hemat tenaga, dari mulai traktor-traktor yang besar sampai dengan pesawat penyemperot hama memungkinkan seorang petani mengelola ribuan meterkubik lahan tanah sekaligus. Gambaran umum mengenai spesialisasi pertanian, menitik beratkan pada pembudidayaan satu jenis tanaman tertentu, pemakaian teknik-teknik yang padat modal dan hemat tenaga kerja terkait pada skala ekonomi, yaitu memperkecil biaya perunit tetapi dengan keuntungan maksimal. Kenyatanya beberapa pengoprasian spesialisasi tanaman dimiliki dan dikelola oleh perusahan-perusahaan agrobisnis.

Untuk lebih jelasnya karakteristik tiga tahapan evolusi pertanian : subsisten, campuran spesialisasi produksi, dapat dilihat pada table berikut ini.

Table 5.1
Ciri-ciri utama tahapan dalam evolusi pertanian.

TAHAPAN-TAHAPAN EVOLUSI PERTANIAN			
Ciri-ciri	**Subsistem**	**Campuran**	**Spesialisasi Produksi**
Komposisi keluaran	Suatu hasil pertanian pokok dan hasil pertanian tambahan	Diversifikasi	Suatu hasil pertanian untuk diperdagangkan dan hasil pertanian tambahan
Tujuan produksi	Sediaan dalam negeri	Sedian dalam negeri dan pasar	Hanya pasar
Jadwal kerja	Musiman	Berimbang	Musiman
Investasi modal	Rendah	Sedang	Tinggi
Pendapatan	Rendah	Tinggi	Tinggi
Jaminan pendapatan	Rendah	Kira-kira separohnya	Sedang (fluktuasi harga)
Rasio pendapatan terhadap nilai keluaran	Tinggi	Beragam	Rendah
Pengatahuan profesional petani	Spesialisasi	Sebahagian	Spesialisasi
Ketergantungan pada sistem pendukung	Tidak		Penuh

Sumber : Weitz (dalam Todaro, 1995 : 375)

Dengan berpengalaman kepada negara-negara maju yang tingkat kemakmuranya tinggi, pilihan kepada spesialisasi produksi yang disesuaikan dengan sumber alam dan permintaan pasar merupakan alternatif yang tepat untuk diterapkan pada pembangunan sosial ekonomi pedesaan. Hanya saja berdasarkan pengalaman spesialisasi.

Produksi, seperti perkebunan inti rakyat, faktor modal, teknologi dan keterlibatan (keikutsertaan) petani yang berada disekitarnya atau sebagai pemilik lahan merupakan faktor yang perlu diperhitungkan, dalam rangka pencapaian pembangunan pedesaan yang beroreintasi pada kepentingan manusia yang sebenarnya. Yang sering menimbulkan konflik adalah para pemilik agrobisni swasta selalu menggarap lahan-lahan petani dalam skala yang luas, tanpa mengikutsertakan petani, bahkan merampas lahan-lahannya. Jadi aspek pengaturan dan pembagian mengurangi resiko spesialisasi produksi dalam skala yang luas.

Dengan mengacu pada beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari berbagai aliran, maka setidak-tidaknya ada beberapa faktor yang harus ada selalu tersedia dan berfungsi pada masyarakat pedesaan, di antaranya :

1. Tenaga kerja yang terampil dan sehat, pembentukan melalui peningkatan sumber daya manusia.
2. Petani yang memiliki tanah (lahan) melalui kebijakan landreform.

3. Dana untuk investasi dan modal kerja, melalui penyediaan kredit jangka panjang dan kecil tingkat suku bunga yang disediakan bank pemerintah atau koperasi desa.
4. Seperangkat aturan yang mencagah terjadinya monopoli /persaingan yang tidak sehat dan iklim sosial politik yang kondusif.
5. Jaminan distribusi dan pemasaran hasil-hasil usaha di pedesaan.
6. Teknologi tepat guna (yang disesuaikan dengan kebutuhan karateristik sosial ekonomi desa).
7. Pembagian kerja (usaha) secara lokal, ragional dan nasional, melalui perkembangan spesialisasi produksi yang sesuai dengan sumber-sumber setempat.
8. Dukungan kebijakan dan kemampuan politik dari pemerintah.
9. Berfungsinya lembaga-lembaga dalam masyarakat. []

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
Nahdlatul Ulama

Daftar Pustaka

Buku :

Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan.* Bandung : Tarsito.

Adiwikarta, Sudardja. 1991. *Beberapa Issue Sosiologi Tentang Masyarakat yang Sedang Membangun.* Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.

Andrew, Mc C. dan Chia Lin Sen. 1982. *Too Rapid Rural Development*. Athens : Ohio University Press.

Anthony, William P. 1991. *Practical Strategic Planning A Guide and Manual for Line Manager.* Tokyo : Toppan Co, Ltd.

Ansoff, I. 1998. Strategic Issue Management. *Journal Strategic Management.* 1 (2). 131-148.

Ansoff, I. Declerk R., dan Hayes R. 1999. From Strategic Planning to Strategic Management. *Journal Strategic Management.* 3 (2), 197-211.

Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan.* Jakarta :Lembaga Studi Pembangunan.

Alvin Y. So. 1990. *Social Change and Development : Modernization, Dependency, and World-System Theories.* London : Sage Publications.

Arifin, Imron (ed.). 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan.* Malang : Kalimasahada Press.

Babbie, Earl R. 1989. *The Practice of Social Research*. Second Edition. California : Wadsworth Publishing Company Inc.

Beals, Ralph L. dan Harry Hoijer. 1961. *To Anthropology*. New York : The Macmillan Company.

Beling dan Totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*. Terjemahan oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.

Bellone, Carl J. 1980. *Organization Theory and The New Public Administration.* Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Bloom, C. 2000. Strategic Planning in the Public Sector. *Journal of Planning Literature*. 1 (2), 253-259.

Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian, Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interests and Institutions.: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell.

Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Bryson, J. M. 1991. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.* San Francisco :Jossey-Bass Publishers.

Bryson, J. M. 1999. The Policy Process and Organizational Form. *Journal Policy Studies*. 12, 445-463.

Bryson, J. M. dan P. Bromiley. 1999. Critical Factors Affecting

the Planning and Implementation of Major Projects. *Journal Strategic Management*, pp, 319-337.

Bryson, J. M., dan Roering, W.D. 2000. Applying Private Sector Strategic Planning to the Public Sector . *Journal of the American Planning Association*. 53, 9-22.

Budiharsono. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori Model Perencanaan dan Penerapannya*. Bogor : IPB.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga.* Jakarta: Gramedia.

Carrell, Michael R , Elbert Norbert F dan Hotfield Robert D. 1995. *Human Resource Management : Global Strategies For Managing A Diverse Work Force*. New Jersey Englewood Cliffs : Prentice Hall Internasional Inc.

Cernea, Michael M. 1991. *Putting People First Sociological Variables in Rural Development.* Wahington D.C. : Oxford University Press.

Collier, William. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia*. Colorado : Westerview Boulder.

Craib, Ian. 1984. *Modern Social Theory.* New York : St. Martin's Press.

Clements, Kevin P. 1997. *Teori Pembangunan Dari Kiri Ke Kanan.* Terjemahan Endi Haryono. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Daft, Richard L. 1992. *Organization Theory and Design*. Singapore : Info Access Distribution PTE Ltd.

Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1989. *Human Behavior at Work*. New York : Mc. Graw-Hill Book Company.

Donnelly, Gibson, dan Ivancevich . 1998. *Fundamental of Management*. New York : Mc. Graw Hill Inc.

Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction.* New Jersey : Prentice Hall Cliffs.

Eaton, Yoseph W (ed.). 1972. *Guideline to Development Theory Formulations. Institution Building and Development: from Concepts to Application.* London : Sage Publication.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C. : Congressional Quarterly Press.

Effendi, Sofian, Sayfri Sairin dan M. Alwi Dahlan. 1993. *Membangun Martabat Manusia.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Effendi, Sofian, T. Keban Yeremias, Ichlasul Amal, Warsito Utomo, dan Hadriyanus Suharyanto. 1989. Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif. *Journal Seri Monograf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Yogyakarta.

Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff. 1982. *Local Organizations : Intermediares in Rural Development.* Ithaca : Cornell University Press.

Esman, Milton J. 1972. *Institution Building and Development : from Concepts to Application*. London : Sage Publication.

--------------. 1991. *Management Dimensions of Development : Perspectives and Strategies.* Connecticut : Kumarian Press.

Esmara, Hendra. 1995. *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta : PAU-EK-UI.

Etzioni, Amitai. 1964. *Modern Organization.* New York : Prentice Hall Cliffs. French, Wendell dan Bell Cecil H. 1978. *Organization Development*. Second Edition. Englewood Cliffs : Prentice Hall.

Fayol, Henri. 1916. *General and Industrial Management.* Terjemahan ke Dalam Bahasa Inggris Oleh Constance Storrs, 1949. London : Pitman.

Ferdinand, Augusty. 2000. *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen : Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian untuk Tesis S-2 dan Disertasi S-3.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Flynn, Norman. 2000. Public Sector Management, Prentice Theory and Practice. *Journal of Planning Literature*. 7, pp. 328-343.

Friedmann, J. 1981. *The Active Community in Rural Development: National Policies and Experiences.* Nagoya : Maruzen Asia.

Garna, Judistira K. dan Rustam A. Sani. 1990. *Antropologi Sosialogi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan*. Malaysia: UKM.

Garna, Judistira K. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial.* Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

---------------. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial : Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Gibson, James L., Ivancevich dan John M. 1985. *Organizations: Behavior, Structure and Processes.* New York : Mc. Graw Hill Inc.

Gluck, F.W., S.P. Kaufman, dan A.S. Walleck. 2000. The Four Phases of strategic Management. *Journal of Business Strategy*, pp. 9-21.

Goldthorpe, J.E. 1988. *The Sociology of the Third World : Disparaty and Development.* Second Edition. Cambridge University Press.

Guest, David. 2001. Human Resource Management : The Worker's Verdict. *Journal Human Resource Management*. 9.3 pp 5-12.

Guilford, J. P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education.* New York : Mc. Graw Hill.

Grindle, Marilee S. (ed.). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third Word.* New Jersey : Princeton University Press.

Grusky, David B. (ed.). 1994. *Social Stratification : Class, Race, and Gender In Sociological Perspective*. San Francisco : Westview Press.

Hambrick, D. C. 2000. Environmental Scanning and Organizational Strategy. *Journal Strategic Management*. 3 (2), 159-174.

Hanafiah, T. 1982. *Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan Pedesaan.* Bogor : Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Handscombe, Richard dan Norman Philip. 1989. *Strategic Leadership, The Missing Links.* Singapore : Mc Graw Hill Inc.

Hans Dieter Evers. 1988. *Teori Masyarakat.* Terjemahan Thomas Rieger. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hansen, Gary E. 1981. *Agricultural and Rural Development in Indonesia.* Colorado : Westview.

Harmon, Michael M. dan Richard T. Mayer. 1986. *Organization Theory for Public Administration.* Boston : Little, Browm and Company.

Harrison, P.G. (ed.). 1990. *Agricultural Technology Transfer*. Darwin : Government Printer of The Nortern Territory.

Harvey, Don dan R. Bruce Bowin. 1996. *Human Resource Management, Experiential Approach*. Boston : Prentice Hall.

Hays, William L. 1969. *Qualification in Psychology*. New Delhi: Prentice Hall of India.

Heady, Ferrel. 1991. *Public Administration, A Comparative Perspective,* New York : Marcel Dekker, Inc.

Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration And Public Affairs*. Fourth Edition. Georgia : Prentice Hall.

Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard dan Dewey E. Johnson. 1996. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources.* New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Hicks, Herbert and G. Ray Gullet. 1987. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku.* Terjemahan G. Kartasapoetra. Jakarta : Bina Aksara.

Hirschman, A. 1967. *Development Project Observed.* Washington D.C : Brookings.

Hodgetts, Richard M. 1982. *Management : Theory, Process and Practice*. New York : Dryden Press.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid I dan Jilid II*. Terjemahan M. Z. Lawang. Jakarta : Erlangga.

Hunger, J. David dan Thomas L. Weelen. 1996. *Strategic Management*. California : Addison Wesley Publishing Company.

Ife, Jim. 1995. *Community Development : Creating Community Alternatives Visions, Analysis and Practices*. Australia : Longman Inc.

Islamy, M. Irfan. 1986. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta : Bina Aksara.

Ismail, Maimunah. 1989. *Pengembangan Implikasi ke Atas Pembangunan Masyarakat.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.

Israil, Arturo. 1987. *International Development, Incetives to Performance.* Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press.

Johnson, Doyle Paul. 1981. *Sociological Theory, Classical Founders and Contemporary Perspectives.* Florida : John Wiley & Sons.

Joiner, Brian L. 1994. *Fourth Generation Management : The New Business Conciousness.* New York : McGraw-Hill, Inc.

Joyce, P. 2001. Strategic Management for Public Services. *Journal of Planning Literature*. 9.2 pp 321-329.

Jenkins, Smith dan Hanks C. 1990. *Democratic Politics and Policy Analysis.* California : Brooks & Cole Publishing.

Jones, Charles O. 1991. *Public Policy.* California : Cole Publishing Company.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : CIDES.

Kaho, J.R. 1989. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* , Jakarta : Rajawali.

Kast, Fremont E. dan James E. Rosenzweig. 1974. *Organization and Management a Systems Approach.* Tokyo : Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd.

Katz, Saul M. 1972. *The Institution–Building Model : A Systems View. Institution Building and Development: from Concepts to Application.* London : Sage Publication.

Koentjaraningrat. 1992. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta : P.T. Gramedia.

Koontz, H., Cyril O'Donnell dan Heinz Weihrich. 1984. *Management*. Eighth Edition. New York : Mc Graw Hill, Inc.

Kusnaedi, 1995. *Membangun Desa.* Jakarta : Swadaya.

Laeyendecker, L. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi.* Jakarta : Gramedia.

Lains, Alfian. 1986. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru.: *Jurnal Prisma No. 4.* Jakarta

Landau, Martin. 1972. *Linkage, Coding, and Intermediacy : A Strategy for Institution Building and Development : from Concepts to Application.* London : Sage Publication.

Lele, Uma. 1975. *The Design of Rural Development*. Wasington D.C : Johns Hopkins University Press.

Lenz, R. 1999. Environment, Strategy, Organization Structure and Performance. *Journal Strategic Management*. 1, 209-226.

Luthans, Fred. 1989. *Organizational Behavior.* Tokyo: Mc Graw-Hill Book Co.

Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa, Kebijaksanaan, dan Manajemen.* Yogyakarta : PT. Media Widya Mandala.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mazmanian, Daniel A, dan Paul A Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy.* Glenview, Illinois : Scott, Foreman, and Company.

McClelland, David C. 1967. *The Achieving Society*. New York : A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.

McFarland. 1979. *Management : Foundations and Practices*. New York : Publishing Co., Inc.

McGrath, Joseph E. 1988. *The Social Psychology of Time, New Perspective.* California : Sage Publication.

Meltsner, Arnold J. 1976. *Policy Analysts in the Bureucracy.* Los Ageles : University of California Press.

Miller, Delbert C. 1983. *Handbook of Research Design and Social Measurement.* New York : Longman Inc.

Mintzberg, Henry. 1994. *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York : Prentice Hall.

Mintzberg, H., dan Waters, J.A. 2001. Of Strategies, Deliberate and Emergent. *Journal Strategic Management*. 6 (3), 257-272.

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Montanari, J.R., dan Bracker, J.S. 1999. The Strategic Management Process. *Journal Strategic Management*. 7 (3), 251-265.

Morris, David. 1979. *Measuring Condition of the World's Poor : The Physical Quality of Life Index.* New York : Pergamon.

Mubyarto, Baswir, Awang dan Santiasih. 1996. *Membahas Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Aditya Media.

Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia.* Yogyakarta : Aditya Media.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.

Nazir, Mohammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nehnevajsa, Jiri. 1972. *Methodological Issues in Institution Building Research. Institution Building and Development: From Concepts to Application.* Yoseph W Eaton, (ed.). London : Sage Publication.

Ndraha, Taliziduhu. 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia.* Jakarta : Bina Aksara.

--------------- . 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nigro, Felix A. dan Nigro Lloyd G. 1984. *Modern Public Administration.* New York : Harper & Row Publishers.

Nutt, P.C., dan Backoff, R. W. 2000. A Stratgegic Management Process for Public and Third-Sector Organization. *Journal of the American Planning Association.* 53, 44-57.

Oakley, Peter dan David Marsden. 1984. *Approaches to Participation in Rural Development.* Geneva : International Labour Office.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York : A Plume Book.

Osborne, David dan Peter Plastrik . 1996. *Banishing Bureaucracy, the Five Strategis for Reinventing Government.* New York : Addison-Wesley Publishing Ciompany.

Pamungkas, Sri Bintang. 1996. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan.* Jakarta : Yasan Daulat Rakyat.

Parsons, Talcott, Edward A. Shills. 1962. *Toward a General Theory of Action.* Massachusetts : Harvard University Press.

Parsons, Talcott. 1964. *The Social System*. Toronto : Collier-Macmillan.

Parsons, Talcott, Edward Shils, Kaspar D Naegele, dan Jesse R. Pitts. 1965. *Teories of Society, Foundations of Modern Sociological* Theory. New York : The Free Press.

Pearce II, John A dan Richard B Robinson Jr. 1988. *Strategic Management : Strategy Formulation and Implementation.* Third Edition. Illinois : Homewood 60430.

Pflaum, A., dan Delmont, T. 2001. External Scanning , A Tool for Planners. *Journal of the American Planning Association.* 53 (1), 56-67.

Prasadja, Buddy. 1986. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.* Jakarta : C.V. Rajawali dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Porter, Michael. 1999. Toward a Dynamic Theory of Strategy. *Journal Strategic Management*, p. 95.

Rais, Muhammad A. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia.* Yogyakarta : Aditya Media.

Redford, Emmette S. 1975. *Ideal and Practice in Public Administration.* Alabama : University Alabama Press.

Rusidi. 1993. *Metode dan Teknik Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.* Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.

Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan.* Terjemahan Lukman Hakim. Jakarta : CV Rajawali.

Ritzer, George. 1980. *Sociology : A Multiple Paradigm Science.* Boston : Allyn and Bacon Inc.

--------------- . 1992. *Sociological Theory*. Edisi Ketiga. Singapore: Mc Graw.

Robbins, Stephen P. 1995. *Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications.* United States of America : Prentice Hall, Inc.

Roberts, Margaret. 1974. *An Introduction to Town Planning Techniques*. London : Hutchinson of London.

Rogers, Everet M. 1969. *Modernization Among Peasant : The Impact of Communication.* New York : Halt Rieviehart & Winston.

Rogers, Everet M. dan F. Floyd Shoemaker. 1971. *Communication of Innovation.* New York : The Free Press.

Rondinelli, Dennis A. Rogers, Everet M.1990. *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu.* Terjemahan Sehat Simamora. Jakarta : Bina Aksara.

Rosenbloom, David H. 1989. *Public Administration-Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector.* Second Edition. Singapore : Mc Graw Hill International Editions.

Rostow, W W. 1960. *The Stages of Economic Growth*. Cambridge University.

Rusli, Sumardjo dan Yusman Syankat 1996. *Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan Kasus Profil Propinsi Riau.* Jakarta : Grasindo.

Saefullah, Asep Djadja. 1993. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Lapangan : Khususnya Dalam Studi Kependudukan. *Jurnal Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran*. Bandung: UNPAD.

--------------. 1995. *Mobilitas Penduduk Desa-Kota : Jembatan Modernisasi Pedesaan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Bandung : Universitas Padjadjaran.

Salim, Emil. 1976. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik , Untuk organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit.* Jakarta: Grasindo.

Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Senge, Peter M. 1990. *The Fifth Discipline the Art and Practice of Learning Organization.* New York : Currency Double Day.

Schoderbek, Schoderbek dan Kefalas. 1985. *Management Systems : Conceptual Considerations.* Amerika : Printed in the United States of America.

Schumacker, Rendall E dan Richard G Lomax. 1996. *A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling*. Mahwah, New Jersey : LEA.

Shafritz, Jay M. dan Albert C. Hyde. 1987. *Classics of Public Administration.* California : Pacific Grove.

Shrode, A William dan Voich Jr. 1974. *Organization and Management Basic System Concept.* Homewood, Illinois: Richard D Irwin Inc.

Siagian, S.P. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa.* Yogyakarta : Citra Bakti Aditya Media.

Siegel, Siedney dan N. J. Castellan, 1988. *Non Parametric Statistics for the Behavioral Sciense*. New York : Mc Graw-Hill Book Comapany.

Siffin, William J. 1972. *The Institution Building Perspective : Properties, Problems, and Promise. Institution Building: A Model for Applied Social.* Cambridge : Schenkman Publishing Company.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1991. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.

Sitepu, Nirwana. 1994. *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung : Unit Pelayanan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran.

Steiner, G. A. 1979. *Strategic Planning : What Every Manager Must Know.* New York : Free Press.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi.* Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta : Erlangga.

Stillman II, Richard J. 1992. *Public Administration.* Boston : Houghton Mifflin Company.

Stoner, A.F. 1988. *Management*. Jakarta : Inter Media.

Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.

Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Sufian. 1995. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.

--------------- . 1997. *Manajemen Pembangunan Pedesaan.* Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.

--------------- . 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.

Sugiyono. 1992. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta.

Sukirno, Sardono. 1979. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor.

Sutermeister, Robert A. 1976. *People and Productivity*. Third Edition. Toronto : Mc Graw Hill.

Sutherland, John W. 1978. *Management Handbook For Public Administration.* New York: Van Nortrand Reinhold Company.

Suwarsono. 1994. *Manajemen Strategik dan Kasus*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN.

Syafruddin, Ateng. 1985. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah.* Bandung : Tarsito.

--------------- . 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah.* Bandung : Bina Cipta.

---------------. 1990. Sekali Lagi, Titik Berat Otonomi (Akan) Diletakkan pada Daerah Tingkat II. Bandung : *Journal Projustitia No. 3 Tahun VIII, Juli 1990*.

---------------. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya.* Bandung : Madar Maju.

Szentes, Tamas. 1976. *The Political Economy of Under-Development.* Budapest : Mc Graw Hill.

Taylor, Frederick W. 1911. *The Principles of Scientific Management*. New York : Harper.

Terry, G.R. 1975. *Principles of Management*. Georgetown, Ontario : Irwin-Dorsey Limited.

Thirlwall A P. 1978. *Growth and Development.* London : The Macmillan Press Ltd.

Thoha, Miftah. 1987. *Perspektif Perilaku Birokrasi.* Jakarta : CV Rajawali.

--------------. 1992. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Jakarta : Rajawali.

Thomson, J. 1967. *Organizations in Action*. New York : Mc Graw Hill Inc.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, AR.. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan.* Jakarta: LP3ES.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perecanaan Pembangunan.* Jakarta : Gunung Agung.

---------------.1993. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan.* Jakarta : LP3ES.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan.* Yokyakarta : Pustaka Pelajar.

Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang.* Terjemahan Agustinus Subekti. Jakarta : Bumi Aksara.

Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development*: *An Analytical Sourcebook With Cases.* Connecticut : Kumarian Press.

Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Weber, Max. 1968. *On Charisma and Institution Building*. Chicago : The University of Chicago Press.

Westra, Pariata, Sediyono, Suharyanto, dan Subando Agus Margono. 1987. *Beberapa Pemikiran Kebijakan Pembangunan Desa yang Mandiri*. Yogyakarta : Pascasarjana UGM.

Weiner, Myron (ed.), 1984. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Wibawa, Samodra (ed.). 1991. *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus.* Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

Winardi. 1979. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Management*. Bandung : Alumni.

---------------. 1986. *Metodologi Research.* Bandung : Alumni.

---------------. 1990. *Manajemen.* Bandung : Mandar Maju.

---------------. 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi.* Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.

---------------. 1999. *Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung : Mandar Maju.

Winardi dan Karhi Nisjar. 1997. *Manajemen Strategik.* Bandung: Mandar Maju.

Yovita, Hetty Indriani. 1993. *Pemilihan Tanaman dan Lahan Sesuai Kondisi Lingkungan dan Pasar*. Jakarta : Swadaya.

Sumber Bacaan Lain :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Riau. 1998. *Propinsi Riau Dalam Membangun*. Pekanbaru: Pusat Informasi dan Publikasi Kantor BAPPEDA Riau.

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri. 1994. *Panduan Operasional Pembangunan Desa*. Jakarta : Dirjen. PMD Depdagri.

Hardi, Usman. 1990. *Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Usaha Tani Sebagai Unit Produksi dan Konsumsi Terpadu Dengan Aplikasi pada Petani Padi Semi–Komersial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Desertasi. Tidak Dipublikasikan.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981. *Tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaksanaan Program Masuk desa.* Jakarta : Departemen Dalam negeri.

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau. 1998. *Buku Saku Pembangunan Masyarakat Desa.* Pekanbaru : Kantor PMD Riau.

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau. 1999. *Laporan Hasil Evaluasi Type dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa yang Telah Disempurnakan , Tahun 1998-1999.* Pekanbaru : Kantor PMD Riau.

Kantor Statistik, Biro Pusat Statistik Propinsi Riau. 1999. *Riau Dalam Angka, Kumpulan Dalam Beberapa Tahun Penerbitan.* Pekanbaru : Kantor Statistik BPS Propinsi Riau.

Karnesih, Erlis Amran. 1997. *Peranan Kepala Desa Dalam Mekanisme Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Tingkat Desa Sebagai Implementasi Strategi Pembangunan Nasional*. Bandung : Pascasarjana UNPAD. Desertasi, Tidak Dipublikasikan.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta : LAN. R.I.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1999. *TAP MPR No. IV/MPR/1999: Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 – 2000*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982. *Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah Jakarta : Departemen Dalam Negeri.*

Rusidi, 1989. *Dinamika Kelompok Tani Dalam Struktur Kekuasaan Masyarakat Desa Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Berusahatani Petani Berlahan Sempit dan Kekuatan Ikatan Patron Klien*. Suatu Survei di Jawa Barat. Bandung : Program Pascasarjana UNPAD. Desertasi. Tidak Dipublikasikan.

Saefullah, Asep Djadja. 1992. *The Impact of Population Mobility on Two Village Communities of West Java, Indonesia*, Ph.D. Thesis, The Flinders University of South Australia. Desertasi. Tidak Dipublikasikan.

Saftawan, A. 2000. *Strategi Pelembagaan Dalam Pembangunan Pedesaan. Studi Model Perilaku Keorganisasian Petugas Lapangan Pembangunan yang Efektif Dalam Rangka Pembangunan Pedesaan di Propinsi Jawa Barat*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD. Desertasi. Tidak Dipublikasikan.

Sufian. 1994. *Perencanaan Berdasarkan Situasi dan Kondisi Merupakan Salah satu Determinan Pokok Dalam Penentuan Target Pungutan dan Pendapatan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kodya Pekanbaru*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Tesis. Tidak Dipublikasikan.

Suhendra, K. 1998. *Peranan Teknobirokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung : Program Pascasarjana UNPAD. Desertasi. Tidak Dipublikasikan.

Suryawikarta, B., 1997. *Tinjauan mengenai Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah.* Presentasi pada Seminar Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam

Rangka Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung : UNPAS.

Tarmizi. 1996. *Kebijaksanaan Pembangunan Pedesaan Dalam Konteks Pembangunan Daerah di Riau*. Padang: Pascasarjana Universitas Andalas. Tesis. Tidak Dipublikasikan.

Tjenreng, Baharuddin. 1993. *Pembangunan Desa Hubungannya Dengan Partisipasi Masyarakat, Desentralisasi Pembangunan dan Otonomi Desa Dalam Kerangka Strategi Pembangunan Nasional*. Bandung : Pascasarjan Universitas Padjadjaran. Desertasi. Tidak Dipublikasikan.

United Nations Centre for Regional Development. 1976. *Methods of Planning for Comprehensive Regional Development : Consolidation of UNCRD'S Experience*. Nagoya.

United Nations Economic Commision for Asia. 1970. *The Far East Sectoral Output and Employment Projections for The Second Development Decade.* Bangkok.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Restu Agung.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jakarta : Restu Agung.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.* Jakarta : Restu Agung.

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966, adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki Komitmen yang Tinggi serta mempunyai kemampuan dalam mengelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam Bidang Manajemen ia juga memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) ia peroleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Di luar kesibukannya menjalankan roda Pemerintahan, Indra Muchlis Adnan menjadi Dosen di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Pengalaman dalam berbagai Organisasi mencatat, ia pernah aktif sebagai Sekretaris dan Ketua DPD KNPI RIAU, Pengurus DPP KNPI, Pengurus DPP AMPI dan Ketua Umum AMPI RIAU, Pengurus DPD Partai Golkar Riau dan saat ini Menjadi Ketua Umum DPD Partai Golkar RIAU, Jabatan Ketua Umum lainnya yang pernah dan sedang diemban adalah Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi Riau, Ketua Umum BPD GAPENSI Riau, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Riau, Ketua KADINDA Riau, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau dan Ketua APKASI/BKKKS, serta Pengda PSSI RIAU.

Dalam bidang Politik, Sejarah mencatat Indra Muchlis Adnan pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003, dan pernah diberi kepercayaan rakyat menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir selama dua periode untuk masa jabatan tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H, M. Si, lahir di Pulau Cawan, Mandah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 12 Februari 1967. Gelar Sarjana Hukum Ketatanegaraan (S-1) Tahun 1985-1989 diraihnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru, Magister Administrasi Publik (S-2) Tahun 1992-1994 dan Doktor Ilmu Administrasi (S-3) Tahun 1997-2001 diraihnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Hingga saat ini bekerja sebagai Dosen dan Guru Besar Tetap FISIP Universitas Islam Riau, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana UNRI, dan Dosen Pascasarjana Universitas Surapati Jakarta. Jabatan yang di emban saat ini sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UIR dan Direktur Pascasarjana Kerjasama UIR-UNPAD.

Selain mengajar aktif juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau adalah ketua dan peneliti pada Pusat Penelitian Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (P2OD & PM) Universitas Islam Riau, Anggota Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Gubernur Riau (TPK2 GUBRI) Tahun 2003-2008, Staf Ahli Konsultan The Institute for Decentralization and Development Studies (InDDeS), Staf Ahli Peneliti pada Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), anggota Advocat dan Konsultan Hukum (AAI). Ia juga aktif menulis di berbagai media cetak.

Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-0992-26-6
9 786020 992266